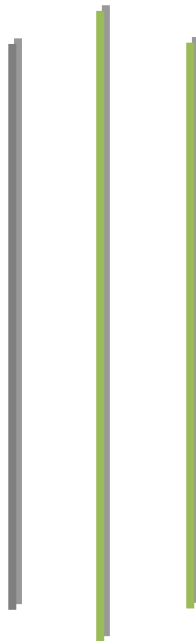




LAPORAN KEUANGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023
AUDITED



PEMERINTAH KOTA BEKASI
TAHUN ANGGARAN 2023



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Karena Atas Perkenannya Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Dapat Diselesaikan.

Tujuan Dari Pembuatan Laporan Keuangan Ini Merupakan Salah Satu Wujud Pertanggungjawaban Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Selaku Pengguna Anggaran Serta Untuk Memberikan Gambaran Mengenai Pelaksanaan Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023.

Kami Menyadari Bahwa Laporan Keuangan Ini Masih Jauh Dari Kata Sempurna, Oleh Sebab Itu Kami Mengharapkan Tanggapan, Saran, Maupun Kritik Yang Membangun Dari Para Pengguna Laporan Keuangan Ini. Kami Akan Terus Berupaya Untuk Dapat Menyusun Dan Menyajikan Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu Dan Akurat Sehingga Terwujud Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dan Diharapkan Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Ini Dapat Meningkatkan Akuntabilitas Publik.

Bekasi, 21 Mei 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BEKASI**



NESAN SUJANA, S.T, M.T, CGCAE
NIP. 19740708 200212 1 007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL.....	IV
DAFTAR LAMPIRAN	VI
SURAT PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN.....	VII
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Neraca Laporan Operasional (LO) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI.....	1
1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI.....	2
1.3. SISTEMATIKA PENYAJIAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	7
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI.....	8
2.1 PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8
2.2. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD ..	9
2.3. HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	13
BAB III PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI.....	22
3.1. BASIS AKUNTANSI	22
3.2 DASAR PENGUKURAN.....	23
3.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	23
BAB IV PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI.....	38
4.1. PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN LRA	40
4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	58
4.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	69
4.4 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	79
BAB V PENUTUP	82



DAFTAR TABEL

TABEL 2. 1 DAFTAR JABATAN DAN PEMANGKU JABATAN.....	8
TABEL 2. 2 JUMLAH PEGAWAI MENURUT GOLONGAN.....	9
TABEL 2. 3 JUMLAH PEGAWAI MENURUT ESELON	9
TABEL 2. 5 PERBANDINGAN ANGGARAN BELANJA DAERAH TA.2023 DAN TA.2022 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI	10
TABEL 2.6 PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023.	10
TABEL 2. 7 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	13
TABEL 4. 1 REALISASI BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022....	40
TABEL 4. 2 REALISASI BELANJA OPERASI TAHUN ANGGARAN 2023 DAN 2022....	41
TABEL 4. 3 BELANJA PEGAWAI TAHUN ANGGARAN 2023.....	42
TABEL 4. 4 BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023	44
TABEL 4. 5 BELANJA BARANG TAHUN ANGGARAN 2023.....	45
TABEL 4. 6 BELANJA JASA TAHUN ANGGARAN 2023	48
TABEL 4. 7 BELANJA PEMELIHARAAN TAHUN ANGGARAN 2023.....	51
TABEL 4. 8 BELANJA PERJALANAN DINAS TAHUN ANGGARAN 2023	52
TABEL 4. 9 BELANJA HIBAH TAHUN ANGGARAN 2023.....	53
TABEL 4. 10 BELANJA MODAL TAHUN 2023	57
TABEL 4. 11 REKAPITULASI ASET PER 31 DESEMBER 2023 DAN DESEMBER 2022	59
TABEL 4. 12 REKAPITULASI PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2023	61
TABEL 4. 13 RINCIAN BARANG PAKAI HABIS PER JENIS TAHUN PER 31 DESEMBER 2023	61
TABEL 4. 14 REKAPITULASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2023.....	62
TABEL 4. 15 REKAPITULASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2023.....	63
TABEL 4. 16 REKAPITULASI ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022.....	63
TABEL 4. 17 REKAPITULASI ASET TETAP LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023	66
TABEL 4. 18 REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022.....	67
TABEL 4. 19 REKAPITULASI ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022	67
TABEL 4. 20 REKAPITULASI ASET LAIN-LAIN PER 31 DESEMBER 2023.....	68
TABEL 4. 21 REKAPITULASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023.....	68
TABEL 4. 22 BEBAN OPERASI – LO PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022	70
TABEL 4. 23 REKAPITULASI BEBAN PEGAWAI-LO PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022	71
TABEL 4. 24 REKAPITULASI BEBAN PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2023.....	72
TABEL 4. 25 REKAPITULASI BEBAN JASA PER 31 DESEMBER 2023	74
TABEL 4. 26 REKAPITULASI BEBAN BARANG PER 31 DESEMBER 2023	75



TABEL 4. 27 REKAPITULASI BEBAN PEMELIHARAAN PER 31 DESEMBER 2023	76
TABEL 4. 28 REKAPITULASI BEBAN PERJALANAN DINAS PER 31 DESEMBER 2023	77
TABEL 4. 29 REKAPITULASI BEBAN HIBAH PER 31 DESEMBER 2023.....	77
TABEL 4. 30 REKAPITULASI BEBAN PENYUSUTAN PER 31 DESEMBER 2023	78
TABEL 4. 31 REKAPITULASI KOREKSI EKUITAS LAINNYA PER 31 DESEMBER 2023	80



DAFTAR LAMPIRAN

1. PA (Prosedure Analitis);
2. Berita Acara Rekonsiliasi Kas Periode Per-31 Desember 2023
3. Berita Acara Rekonsiliasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Per-31 Desember 2023
4. Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan Periode 1 Januari S/D 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023
5. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya Periode 1 Januari S/D 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023
6. Rekening Koran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Per-31 Desember 2023
7. Bukti Pengembalian (STS)
8. Rekap Utang Beban



Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Selaku Pengguna Anggaran Dan Barang Tahun Anggaran 2023 Kami Bertanggung Jawab Atas Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan SKPD Tahun Anggaran 2023 Berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Yang Memadai Dan Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan Dan Perundang-Undangan Tentang Keuangan Daerah Dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual Yang Terdiri Dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Demikianlah Pernyataan Ini Kami Buat Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Bekasi, 21 Mei 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BEKASI**



NESAN SUJANA, S.T, M.T, CGCAE
NIP. 19740708 200212 1 007



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi

Dalam Rangka Menciptakan Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Mewujudkan *Good Governance* Adalah Dengan Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Pemerintah Yang Memenuhi Prinsip Tepat Waktu Dan Disusun Dengan Mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Diterima Secara Umum.

Tujuan Umum Laporan Keuangan Adalah Menyajikan Informasi Mengenai Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Dan Kinerja Keuangan Suatu Entitas Pelaporan Yang Bermanfaat Bagi Para Pengguna Dalam Membuat Dan Mengevaluasi Keputusan Mengenai Alokasi Sumber Daya. Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Secara Spesifik Adalah Untuk Menyajikan Informasi Yang Berguna Untuk Pengambilan Keputusan Dan Untuk Menunjukkan Akuntabilitas Entitas Pelaporan Atas Sumber Daya Yang Dipercayakan Kepada SKPD.

Laporan Keuangan Disusun Untuk Menyediakan Informasi Yang Relevan Mengenai Posisi Keuangan Selama Satu Periode Pelaporan. Laporan Keuangan Terutama Digunakan Untuk Membandingkan Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer Dan Pembiayaan Dengan Anggaran Yang Telah Ditetapkan, Menilai Kondisi Keuangan, Mengevaluasi Efektivitas Dan Efisiensi Suatu SKPD, Dan Membantu Menentukan Ketaatannya Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 Bertujuan Untuk Menyajikan Informasi Yang Bermanfaat Bagi Para Pengguna Dalam Menilai Akuntabilitas Dan Membuat Keputusan Baik Keputusan Ekonomi, Sosial, Maupun Politik Dengan :

1. Menyediakan Informasi Tentang Sumber, Alokasi Dan Penggunaan Sumber Daya Keuangan;
2. Menyediakan Informasi Mengenai Penerimaan Periode Berjalan ;



3. Menyediakan Informasi Mengenai Jumlah Sumber Daya Ekonomi Yang Digunakan Dalam Kegiatan SKPD Serta Hasil-Hasil Yang Telah Dicapai;
4. Menyediakan Informasi Mengenai Posisi Keuangan Berkaitan Dengan Sumber-Sumber Penerimaan, Baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, Termasuk Yang Berasal Dari Pungutan Pajak Dan Retribusi;
5. Menyediakan Informasi Mengenai Perubahan Posisi Keuangan, Apakah Mengalami Kenaikan Atau Penurunan, Sebagai Akibat Kegiatan Yang Dilakukan Selama Periode Pelaporan.

Untuk Memenuhi Tujuan-Tujuan tersebut, Laporan Keuangan Tahun 2023 Menyediakan Informasi Mengenai Sumber Dan Penggunaan Sumber Daya Keuangan/Ekonomi, Transfer, Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pelaksanaan Anggaran, Saldo Anggaran Lebih, Surplus/Defisit-Laporan Operasional (LO), Aset, Kewajiban, Dan Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi

Peraturan Perundang-Undangan Yang Dijadikan Dasar Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Adalah:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021



- Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor



- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 16 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2022 Nomor 12);
19. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 52 Seri E) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 05 Seri E);
20. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 64 Seri E) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan



- Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 59);
21. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 105 Seri E);
 22. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 88 Seri E);
 23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 33);
 24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 92 Seri E) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 73);
 25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 29).
-



26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Pendapatan Dan Belanja Daerah Yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2023 Nomor 61).

1.3. Sistematika Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan Disusun Dengan Sistematika Penulisan

Sebagai Berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3. Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD

- 2.1. Profil Dan Kebijakan Teknis SKPD
- 2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD
- 2.3. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab III Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

- 3.1. Basis Akuntansi
- 3.2. Dasar Pengukuran
- 3.3. Kebijakan Akuntansi

Bab IV Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD

- 4.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 4.2. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca
- 4.3. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional
- 4.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab V Penutup



BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

2.1 Profil Dan Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Serta Rincian Tugas Jabatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Ditetapkan Berdasarkan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 129 Tahun 2021. Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Ini Sebagai Tindak Lanjut Dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Mempunyai Tugas Pokok Membantu Walikota Dalam Memimpin, Mengendalikan Dan Mengkoordinasikan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Lingkup Kesatuan Bangsa Dan Politik Yang Meliputi :

- Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa;
- Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik ;
- Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Masyarakat;
- Bidang Politik Dalam Negeri.

Tabel 2. 1 Daftar Jabatan Dan Pemangku Jabatan

URAIAN JABATAN	PEMANGKU JABATAN
Kepala Badan	: NESAN SUJANA, S.T, M.T, CRP,CRMP, CGCAE
Sekretaris Badan	YUNAN ALBAEHAQI, S.Sos., M.M
Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa	: RATNA NINGSIH, M.Si
Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik	: DEDY MULYADI, SE
Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama Dan Organisasi Masyarakat	: Drs. H. Agus Enap, M. Pd
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri	: Muhamad Arifin, S.Ip

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian Badan Kesbangpol



Kondisi Pegawai Per Tanggal 31 Desember 2023 Dengan Uraian Sebagai Berikut :

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Golongan IV	11	
Golongan III	19	
Golongan II	7	
TKK	10	
Jumlah	47	

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian Badan Kesbangpol

Tabel 2. 3 Jumlah Pegawai Menurut Eselon

URAIAN	JUMLAH	KETERANGAN
Eselon II	1	
Eselon III	5	
Eselon IV	9	
Jumlah	15	

Sumber Data : Kasubag Umum Dan Kepegawaian Badan Kesbangpol

2.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

APBD Pada Hakikatnya Merupakan Instrumen Kebijakan Yang Dipakai Sebagai Alat Dengan Tujuan Untuk Meningkatkan Pelayanan Umum Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Daerah. Oleh Karena Itu, DPRD Dan Pemerintah Daerah Harus Selalu Berupaya Secara Nyata Dan Terstruktur Untuk Menghasilkan Suatu APBD Yang Dapat Mencerminkan Kebutuhan Riil Masyarakat Atas Dasar Potensi Masing-Masing Daerah Serta Dapat Memenuhi Tuntutan Terciptanya Anggaran Daerah Yang Berorientasikan Kepentingan Dan Akuntabilitas Publik. Suatu Anggaran Yang Telah Direncanakan Dengan Baik, Sehingga Baik Tujuan Maupun Sasaran Akan Dapat Tercapai Secara Berdayaguna Dan Berhasil Guna.

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan TA.2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Menggambarkan Pencapaian Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Anggaran Belanja Daerah Berdasarkan Target Yang Telah



Ditetapkan Pada Dokumen APBD, Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Belanja Daerah Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Pada Tahun Anggaran 2023 Mempunyai Pagu Anggaran Belanja Tahun 2023 Sebesar Rp. 27.091.809.600,00 .

Tabel 2. 4 Perbandingan Anggaran Belanja Daerah TA.2023 Dan TA.2022 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi

Uraian	2023			2022		
	Pagu	Realisasi Anggaran	%	Pagu	Realisasi Anggaran	%
	Anggaran (Rp)	(Rp)		Anggaran (Rp)	(Rp)	
BELANJA	85.390.004.473,00	77.862.899.918,00	91,19	24.667.548.635,00	19.893.811.947,00	80,65
Belanja Operasi	80.460.630.473,00	77.857.199.918,00	96,76	24.634.211.635,00	19.861.586.947,00	80,63
Belanja Pegawai	8.894.620.000,00	7.943.269.130,00	89,30	9.090.250.000,00	8.500.715.974,00	93,51
Belanja Barang Dan Jasa	7.666.820.473,00	6.378.879.599,00	83,20	7.150.640.635,00	3.396.060.646,00	47,49
Belanja Hibah	63.899.190.000,00	63.535.051.189,00	99,43	8.393.321.000,00	7.964.810.327,00	94,89
Belanja Modal	4.929.374.000,00	5.700.000,00	0,12	33.337.000,00	32.225.000,00	96,66
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	4.929.374.000,00	5.700.000,00	0,12	33.337.000,00	32.225.000,00	96,66

Kinerja Program Kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Di Anggarkan Sebesar Rp. 85.390.004.473,00. Terealisasi Sampai Dengan 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 77.862.899.918,00 Atau 91,19%. Bentuk Realisasi Kegiatan Dan Sub Kegiatan Tersebut Antara Lain :

Tabel 2.5 Pencapaian Target Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI 31 Desember 2023	
	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	85.390.004.473,00	77.862.899.918,00	91,19
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.960.000,00	98,67
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi	3.000.000,00	2.960.000,00	98,67



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI 31 Desember 2023	
	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4
Kinerja SKPD			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.897.620.000,00	7.946.269.130,00	89,31
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	8.894.620.000,00	7.943.269.130,00	89,30
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.000.000,00	303.345.751,00	91,92
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.000.000,00	152.289.000,00	89,58
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	18.370.000,00	91,85
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	92.866.751,00	92,87
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	10.000.000,00	9.820.000,00	98,20
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.777.613,00	540.381.590,00	98,47
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.777.613,00	540.381.590,00	98,47
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.000.000,00	265.250.998,00	94,73
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	235.250.998,00	94,10
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.611.580.860,00	2.373.801.860,00	90,90
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	2.611.580.860,00	2.373.801.860,00	90,90
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik,	61.148.826.000,00	55.674.496.589,00	91,05



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI 31 Desember 2023	
	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Ser			
Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi P	59.867.790.000,00	54.930.051.189,00	91,75
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Pol	1.246.880.000,00	744.445.400,00	59,70
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Sert	34.156.000,00	0,00	0,00
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.255.000.000,00	8.740.230.000,00	94,44
Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	8.955.000.000,00	8.605.000.000,00	96,09
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	300.000.000,00	135.230.000,00	45,08
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	800.000.000,00	661.083.000,00	82,64
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	800.000.000,00	661.083.000,00	82,64
Perumusan Kebijakan Teknis Dan	1.495.200.000,00	1.335.081.000,00	89,29



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI 31 Desember 2023	
	(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	4
Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial			
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik	845.200.000,00	748.731.000,00	88,59
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	650.000.000,00	586.350.000,00	90,21

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun Anggaran 2023

2.3. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Diharapkan Dapat Menjabarkan Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pelaksanaan APBD. Oleh Karena Itu, Ketika Realisasi Pendapatan Dan Belanja Daerah Tidak Mencapai 80% Maka Dinilai Menjadi Faktor Penghambat Optimalisasi Kinerja Keuangan Daerah. Berikut Ini Dijabarkan Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Selama Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Bawah 80% Dari Alokasi Anggaran Yang Telah Ditetapkan S.D TA. 2023. Dalam Laporan Ini Dijelaskan Capaian Target Selama Tahun 2023.

2.3.1. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Belanja Daerah

Tabel 2. 6 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI 31 Desember 2023		Hambatan Dan Kendala
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
BADAN KESATUAN	85.390.004.473,00	77.862.899.918,00	91,19	



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI 31 Desember 2023		Hambatan Dan Kendala
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
BANGSA DAN POLITIK				
Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000,00	2.960.000,00	98,67	
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.000.000,00	2.960.000,00	98,67	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.897.620.000,00	7.946.269.130,00	89,31	
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	8.894.620.000,00	7.943.269.130,00	89,30	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	
Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Administrasi Umum Perangkat Daerah	330.000.000,00	303.345.751,00	91,92	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	170.000.000,00	152.289.000,00	89,58	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI 31 Desember 2023		Hambatan Dan Kendala
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	20.000.000,00	18.370.000,00	91,85	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100.000.000,00	92.866.751,00	92,87	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	10.000.000,00	9.820.000,00	98,20	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	548.777.613,00	540.381.590,00	98,47	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	548.777.613,00	540.381.590,00	98,47	Penyerapan Sudah Sesuai Dengan Jumlah Pegawai TKK
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	280.000.000,00	265.250.998,00	94,73	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	250.000.000,00	235.250.998,00	94,10	Penyerapan Sesuai Dengan Jangka Waktu Pembayaran Pajak, Service Kendaraan Dinas Jabatan R4 Dan R2 Yang Ada
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan	2.611.580.860,00	2.373.801.860,00	90,90	



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI 31 Desember 2023		Hambatan Dan Kendala
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Karakter Kebangsaan				
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan	2.611.580.860,00	2.373.801.860,00	90,90	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Ser	61.148.826.000,00	55.674.496.589,00	91,05	



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI 31 Desember 2023		Hambatan Dan Kendala
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi P	59.867.790.000,00	54.930.051.189,00	91,75	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Pol	1.246.880.000,00	744.445.400,00	59,70	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI 31 Desember 2023		Hambatan Dan Kendala
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Sert	34.156.000,00	0,00	0,00	Keterbatasan Waktu
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.255.000.000,00	8.740.230.000,00	94,44	
Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	8.955.000.000,00	8.605.000.000,00	96,09	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI 31 Desember 2023		Hambatan Dan Kendala
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas Dan Ormas Asing Di Daerah	300.000.000,00	135.230.000,00	45,08	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	800.000.000,00	661.083.000,00	82,64	
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama Dan Penghayat Kepercayaan Di Daerah	800.000.000,00	661.083.000,00	82,64	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada
Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial	1.495.200.000,00	1.335.081.000,00	89,29	



PROGRAM DAN NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI 31 Desember 2023		Hambatan Dan Kendala
	(Rp)	(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5
Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, Serta Penanganan Konflik	845.200.000,00	748.731.000,00	88,59	Dalam Proses Pekerjaan Belum Dilakukan Pencairan
Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing Dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan,	650.000.000,00	586.350.000,00	90,21	Penyerapan Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada

Berikut Ini Dijelaskan Hambatan Dan Kendala Yang Dihadapi Dalam Pencapaian Realisasi Anggaran Belanja Yang Telah Ditetapkan

- Terdapat Beberapa Kegiatan Yang Melakukan Parsial Sehingga Ada Perubahan Jadwal Pelaksanaan;



- Bahwa Dengan Adanya Perpindahan Pejabat/Mutasi Maka Dokumen-Dokumen (SPJ) Mengalami Perubahan;
- Untuk Kegiatan Penyusunan Program Kerja Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi P
Kendala

Alasan Tidak Belanja Modal Handy Talky:

Kendala Pengadaan Barang:

- Handy Talky Motorola CP1300 VHF Frekuensi 136-174 Merupakan Barang Import Dan Perlu Proses Indent, Maka Dalam Permintaan Dengan Jumlah 1.119 Unit, Tidak Mampu Dibelanjakan Dalam Waktu Sisa S.D Batas Akhir Pencairan Anggaran APBD T.A 2023
- Handy Talky Motorola CP1300 VHF Frekuensi 136-174 Tidak Memiliki Sertifikat TKDN Dan BMP Yang Mencukupi Sesuai Perpres PBJP Dengan Minimal Sebesar 40%
- Handy Talky Dengan Merk Lokal Seperti Icom Tidak Memiliki Service Center Yang Mapan Dan Tidak Ada Di Area Kota Bekasi

Kendala Teknis Instalasi:

Instalasi Handy Talky, Membutuhkan Repeater Yang Tersebar Di Seluruh Kecamatan Se-Kota Bekasi. Namun Tidak Terdapat Pengadaan Atau Repeater Eksisting Yang Dimiliki Pemerintah Kota Bekasi. Sehingga Apabila Pengadaan Dilaksanakan Tujuan Tidak Akan Berjalan Efektif

Kendala Ketidaksesuaian Tujuan Pengadaan Dengan Capaian Program Pada Bidang Poldagri, Yaitu Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. Dengan Capaian Program, Yaitu Jumlah Masyarakat Yang Mendapat Pembinaan Politik Di Kota Bekasi



BAB III PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Merupakan Laporan Mencakup Seluruh Aspek Keuangan Yang Dikelola Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi. Laporan Keuangan Ini Dihasilkan Melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Yaitu Serangkaian Prosedur Manual Maupun Yang Terkomputerisasi Mulai Dari Pengumpulan Data, Pencatatan, Dan Pengikhtisaran Sampai Dengan Pelaporan Posisi Keuangan Dan Operasi Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi.

SAI Terdiri Dari SIMDA Keuangan Dan SIMDA BMD. SIMDA Keuangan Dirancang Untuk Menghasilkan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dan Neraca. Sedangkan SIMDA BMD Adalah Sistem Yang Menghasilkan Informasi Aset Tetap Dan Aset Lainnya Untuk Penyusunan Neraca Dan Laporan Barang Milik Daerah Serta Laporan Menajerial Lainnya.

3.1. Basis Akuntansi

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Menerapkan Basis Akrual Dalam Penyusunan Dan Penyajian Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Dan Neraca Serta Basis Kas Untuk Penyusunan Dan Penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual Adalah Basis Akuntansi Yang Mengakui Pengaruh Transaksi Dan Peristiwa Itu Terjadi, *Tanpa Memperhatikan Saat Kas Atau Setara Kas Diterima Atau Dibayarkan.*

Sedangkan Basis Kas Adalah Basis Akuntansi Yang Mengakui Pengaruh Transaksi Atau Peristiwa Lainnya Pada Saat Kas Atau Setara Kas Diterima Atau Dibayar. Hal Ini Sesuai Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Yang Telah Ditetapkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.



3.2 Dasar Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Bekasi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 83 Tahun 2018, Pengukuran Adalah Proses Penetapan Nilai Uang Untuk Mengakui Dan Memasukkan Setiap Pos Dalam Laporan Keuangan. Pengukuran Pos-Pos Dalam Laporan Keuangan Menggunakan Nilai Perolehan Historis. Pengukuran Pos-Pos Laporan Keuangan Menggunakan Mata Uang Rupiah. Transaksi Yang Menggunakan Mata Uang Asing Terlebih Dahulu Dikonversi Dan Dinyatakan Dalam Nilai Mata Uang Rupiah. Secara Lebih Rinci Pengukuran Pos-Pos Laporan Keuangan Akan Dijelaskan Dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi.

3.3 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2013 Telah Mengacu Pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan Akuntansi Merupakan Prinsip-Prinsip, Dasar-Dasar, Konvensi-Konvensi, Aturan-Aturan, Dan Praktik-Praktik Spesifik Yang Dipilih Oleh Suatu Entitas Pelaporan Dalam Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi Yang Diterapkan Dalam Laporan Keuangan Ini Adalah Merupakan Kebijakan Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Walikota Bekasi Nomor 83 Tahun 2018.

Disamping Itu, Dalam Penyusunannya Telah Diterapkan Kaidah-Kaidah Pengelolaan Keuangan Yang Sehat Di Lingkungan Pemerintahan.

Kebijakan-Kebijakan Akuntansi Penting Yang Digunakan Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Adalah Sebagai Berikut:

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Mengungkapkan Kegiatan Keuangan Pemerintah Daerah Yang Menunjukkan Ketaatan Terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran Menggambarkan Perbandingan Antara Anggaran Dengan



Realisasinya Dalam Satu Periode Pelaporan Dan Menyajikan Unsur-Unsur Sebagai Berikut:

Pendapatan (Basis Kas) Adalah Penerimaan Oleh Bendahara Umum Daerah Atau Oleh Entitas Pemerintah Daerah Lainnya Yang Menambah Ekuitas Dana Lancar Dalam Periode Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Yang Menjadi Hak Pemerintah Kota Bekasi, Dan Tidak Perlu Dibayar Kembali.

Pendapatan-LRA Adalah Semua Penerimaan Rekening Kas Umum Daerah Yang Menambah Saldo Anggaran Lebih Dalam Periode Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Yang Menjadi Hak Pemerintah, Dan Tidak Perlu Dibayar Kembali Oleh Pemerintah.

Pendapatan-LRA Diakui Pada Saat :

Pendapatan-LRA Diukur Dan Dicatat Berdasarkan Azas Bruto, Yaitu Dengan Membukukan Penerimaan Bruto, Dan Tidak Mencatat Jumlah Nettoanya (Setelah Dikompensasikan Dengan Pengeluaran);

Pendapatan (Basis Akrual) Adalah Hak Pemerintah Yang Diakui Sebagai Penambah Nilai Kekayaan Bersih;

Belanja (Basis Kas) Adalah Semua Pengeluaran Oleh Bendahara Umum Daerah Yang Mengurangi Ekuitas Dana Lancar Dalam Periode Tahun Anggaran Bersangkutan Yang Tidak Akan Diperoleh Pembayarannya Kembali Oleh Pemerintah Daerah;

Belanja (Basis Akrual) Adalah Kewajiban Pemerintah Yang Diakui Sebagai Pengurang Nilai Kekayaan Bersih;

Transfer Adalah Penerimaan/Pengeluaran Uang Dari Suatu Entitas Pelaporan Dari/Kepada Entitas Pelaporan Lain, Termasuk Dana Perimbangan Dan Dana Bagi Hasil;

Pembiayaan (*Financing*) Adalah Setiap Penerimaan Yang Perlu Dibayar Kembali Dan/Atau Pengeluaran Yang Akan Diterima Kembali, Baik Pada Tahun Anggaran Bersangkutan Maupun Tahun-Tahun Anggaran Berikutnya, Yang Dalam Penganggaran Pemerintah Terutama Dimaksudkan Untuk Menutup Defisit Atau Memanfaatkan Surplus Anggaran;

Penerimaan Pembiayaan Antara Lain Dapat Berasal Dari Pinjaman Dan Hasil Divestasi. Pengeluaran Pembiayaan Antara Lain Digunakan Untuk



Pembayaran Kembali Pokok Pinjaman, Pemberian Pinjaman Kepada Entitas Lain, Dan Penyertaan Modal Oleh Pemerintah.

H. Surplus/Defisit-LRA;

Surplus/Defisit –LRA Adalah Selisih Lebih/Kurang Antara Pendapatan – LRA Dan Belanja Selama Satu Periode Pelaporan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Adalah Selisih Lebih/Kurang Antara Realisasi Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Selama Satu Perode Pelaporan. Selisih Lebih/Kurang Antara Realisasi Penerimaan Dan Pengeluaran Selama Satu Periode Pelaporan Dicatat Dalam Pos Silpa/Sikpa.

Neraca

Neraca Menggambarkan Posisi Keuangan Pemerintah Daerah Mengenai Aset, Kewajiban, Dan Ekuitas Pada Tanggal Tertentu. Pemerintah Kota Bekasi Mengklasifikasikan Asetnya Dalam Aset Lancar Dan Aset Tetap Serta Mengklasifikasikan Kewajibannya Menjadi Kewajiban Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Dalam Neraca. Sedangkan Ekuitas Adalah Kekayaan Bersih Pemerintah Yang Merupakan Selisih Antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah Pada Tanggal Laporan.

Akun Pada Neraca Terdiri Dari :

Kas

Kas Adalah Uang Tunai Dan Saldo Simpanan Di Bank Yang Setiap Saat Dapat Digunakan Untuk Membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah.

Setara Kas Adalah Investasi Jangka Pendek Yang Sifatnya Likuid Yang Siap Dicairkan Menjadi Kas Serta Bebas Dari Risiko Perubahan Nilai Yang Signifikan. Kas Dicatat Sebesar Nilai Nominal. Nilai Nominal Artinya Disajikan Sebesar Nilai Rupiahnya. Apabila Terdapat Kas Dalam Bentuk Valuta Asing, Dikonversi Menjadi Rupiah Menggunakan Kurs Tengah Bank Sentral Pada Tanggal Neraca.

Persediaan

Persediaan Adalah Aset Lancar Dalam Bentuk Barang Atau Perlengkapan Yang Dimaksudkan Untuk Mendukung Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah, Dan Barang-Barang Yang Dimaksudkan Untuk Dijual Dan/Atau Diserahkan Dalam



Rangka Pelayanan Kepada Masyarakat, Termasuk Barang-Barang Yang Akan Dihilangkan.

Pengakuan Persediaan Sebagai Berikut :

Persediaan Diakui Pada Saat :

Potensi Manfaat Ekonomi Masa Depan Diperoleh Pemerintah Daerah Dan Mempunyai Nilai Atau Biaya Yang Dapat Diukur Dengan Andal;

Diterima Atau Hak Kepemilikannya Dan/Atau Kepenguasaannya Bepindah.

Persediaan Dinilai Menggunakan Metode FIFO (*First In First Out*).

Pada Akhir Periode Akuntansi Catatan Persediaan Disesuaikan Dengan Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname). Dalam Hal Terjadi Selisih Persediaan Antara Catatan Persediaan Menurut Pengurus Barang Atau Catatan Persediaan Menurut Fungsi Akuntansi Dengan Hasil Stock Opname :

A. Jika Terdapat Selisih Kurang Persediaan Dari Catatan Persediaan Dikarenakan Sudah Tidak Dapat Dipergunakan Untuk Jangka Waktu Tertentu, Yang Secara Normal Dipertimbangkan Wajar Menjadi Penyebab Penghapusan, Seperti, Hilang Karena Kecurian, Terbakar, Susut, Menguap, Mencair, Kadaluwarsa, Mati Untuk Tanaman Dan Hewan, Dan Sebagai Akibat Dari Keadaan Kahar (*Force Majeure*),Maka Selisih Persediaan Tersebut Diakui Sebagai Beban Persediaan Kadaluarsa/Rusak Setelah Sebelumnya Disajikan Pada Persediaan Kadaluarsa/Rusak.

B. Jika Selisih Persediaan Dipertimbangkan Sebagai Suatu Kondisi Yang Abnormal, Maka Selisih Persediaan Ini Diperlakukan Sebagai Kerugian Daerah.

C. Penghapusan Barang Yang Sudah Tidak Dapat Dipergunakan Dalam Jangka Waktu Tertentu Diatur Dalam Peraturan Wali Kota Tersendiri.

4. Persediaan Yang Telah Dihapuskan Karena Sudah Tidak Dapat Dipergunakan Untuk Jangka Waktu Tertentu Dikarenakan Penyerahan, Pemindahtanganan, Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dan Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya, Menjalankan Kekuatan Perundang-Undangan, Pemusnahan Atau Sebab Lain Diakui Sebagai Beban Persediaan.

Aset Tetap



Aset Tetap Adalah Aset Berwujud Yang Mempunyai Masa Manfaat Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan Untuk Digunakan Dalam Kegiatan Pemerintah Daerah Atau Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Umum.

Pada Umumnya Aset Tetap Diakui Pada Saat Manfaat Ekonomi Masa Depan Dapat Diperoleh Dan Nilainya Dapat Diukur Dengan Handal. Untuk Dapat Diakui Sebagai Aset Tetap Harus Dipenuhi Kriteria Sebagai Berikut :

Berwujud;

Mempunyai Masa Manfaat Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan;

Biaya Perolehan Aset Dapat Diukur Secara Andal;

Tidak Dimaksudkan Untuk Dijual Dalam Operasi Normal Entitas; Dan

Diperoleh Atau Dibangun Dengan Maksud Untuk Digunakan;

Nilai Rupiah Pembelian Barang Material Atau Pengeluaran Untuk Pembelian Barang Tersebut Memenuhi Batasan Minimal Kapitalisasi Aset Tetap Yang Telah Ditetapkan.

Namun Demikian, Dengan Pertimbangan Biaya Dan Manfaat Serta Kepraktisan, Pengakuan Aset Tetap Dilakukan Pada Saat Dilakukan Serah Terima Aset Tetap Tersebut. Tetapi Jika Diakhir Periode Akuntansi Aset Dari Belanja Modal Belum Jadi, Maka Akan Direklass Ke Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Pengukuran Aset Tetap

Aset Tetap Dinilai Dengan Biaya Perolehan. Apabila Penilaian Aset Tetap Dengan Menggunakan Biaya Perolehan Tidak Memungkinkan Maka Nilai Aset Tetap Didasarkan Pada Nilai Wajar Yang Ditetapkan Oleh Tim Penilai

Internal/Tim Verifikasi Atau Untuk Tanah Dapat Menggunakan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Tanah Setempat. Jika Aset Tetap Selain Tanah Nilai

Perolehannya Tidak Didapat Maka Dapat Mempergunakan Nilai Sesuai SP2D Sejenis Pada Tahun Perolehannya.

Untuk Tujuan Pernyataan Ini, Penggunaan Nilai Wajar Pada Saat Perolehan Untuk Kondisi Diatas Bukan Merupakan Suatu Proses Penilaian Kembali (*Revaluasi*) Dan Tetap Konsisten Dengan Biaya Perolehan. Penilaian Kembali Yang Dimaksud Hanya Diterapkan Pada Penilaian Untuk Periode Pelaporan Selanjutnya, Bukan Pada Saat Perolehan Awal.



Pengukuran Dapat Dipertimbangkan Andal Bila Terdapat Transaksi Pertukaran Dengan Bukti Pembelian Aset Tetap Yang Mengidentifikasi Biayanya. Dalam Keadaan Suatu Aset Yang Dikonstruksi/Dibangun Sendiri, Suatu Pengukuran Yang Dapat Diandalkan Atas Biaya Dapat Diperoleh Dari Transaksi Pihak Eksternal Dengan Entitas Tersebut Untuk Perolehan Bahan Baku, Tenaga Kerja Dan Biaya Lain Yang Digunakan Dalam Proses Konstruksi.

Biaya Perolehan Aset Tetap Yang Dibangun Dengan Cara Swakelola Meliputi Biaya Langsung Untuk Tenaga Kerja, Bahan Baku, Dan Biaya Tidak Langsung Termasuk Biaya Perencanaan Dan Pengawasan, Perlengkapan, Tenaga Listrik, Sewa Peralatan, Dan Semua Biaya Lainnya Yang Terjadi Berkenaan Dengan Pembangunan Aset Tetap Tersebut.

Untuk Keperluan Penyusunan Neraca Awal Suatu Entitas, Biaya Perolehan Aset Tetap Yang Digunakan Adalah Nilai Wajar Pada Saat Neraca Awal Tersebut Disusun. Untuk Periode Selanjutnya Setelah Tanggal Neraca Awal, Atas Perolehan Aset Tetap Baru, Suatu Entitas Menggunakan Biaya Perolehan Atau Harga Wajar Bila Biaya Perolehan Tidak Ada. Harga Wajar Bisa Didapat Dengan Mencari Nilai Per Satuan Barang Sejenis Yang Dibeli Pada Tahun Perolehan Tersebut.

Penyusutan

Metode Penyusutan Yang Dipergunakan Adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*).

Nilai Penyusutan Untuk Masing-Masing Periode Diakui Sebagai Beban Penyusutan Dan Dicatat Pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Sebagai Pengurang Nilai Aset Tetap;

Nilai Penyusutan Dihitung Setiap Bulan Sedangkan Untuk Pelaporannya Disajikan Dalam 1 (Satu) Semester (6 Bulan) Atau 1 (Satu) Tahun Dengan Memperhatikan Saat Perolehannya;

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan Adalah Aset-Aset Tetap Yang Sedang Dalam Proses Pembangunan. Suatu Aset Berwujud Harus Diakui Sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan Jika:



Besar Kemungkinan Bahwa Manfaat Ekonomi Masa Yang Akan Datang Berkaitan Dengan Aset Tersebut Akan Diperoleh;

Biaya Perolehan Tersebut Dapat Diukur Secara Andal; Dan

Aset Tersebut Masih Dalam Proses Pengerjaan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya Merupakan Aset Pemerintah Daerah Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan Sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap Dan Dana Cadangan;

Pengakuan Aset Lainnya :

Secara Umum Aset Lainnya Dapat Diakui Pada Saat :

Potensi Manfaat Ekonomi Masa Depan Diperoleh Oleh Pemerintah Daerah Dan Mempunyai Nilai Atau Biaya Yang Dapat Diukur Dengan Andal;

Diterima Atau Kepemilikannya Dan/Atau Kepenguasaannya Berpindah.

Aset Lainnya Yang Diperoleh Melalui Pengeluaran Kas Maupun Tanpa Pengeluaran Kas Dapat Diakui Pada Saat Terjadinya Transaksi Berdasarkan Dokumen Perolehan Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku;

Aset Lainnya Yang Berkurang Melalui Penerimaan Kas Maupun Tanpa Penerimaan Kas, Diakui Pada Saat Terjadinya Transaksi Berdasarkan Dokumen Yang Sah Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Pengukuran Dan Penilaian Aset Lainnya, Yaitu :

Tagihan Penjualan Angsuran Dinilai Sebesar Nilai Nominal Dari Kontrak/Berita Acara Penjualan Aset Yang Bersangkutan Setelah Dikurangi Dengan Angsuran Yang Telah Dibayarkan Oleh Pegawai Ke Kas Umum Daerah Atau Berdasarkan Daftar Saldo Tagihan Penjualan Angsuran;

Tuntutan Perbendaharaan Dinilai Sebesar Nilai Nominal Dalam Surat Keputusan Pembebanan Setelah Dikurangi Dengan Setoran Yang Telah Dilakukan Oleh Bendahara Yang Bersangkutan Ke Kas Umum Daerah;

Tuntutan Ganti Rugi Dinilai Sebesar Nilai Nominal Dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) Setelah Dikurangi Dengan Setoran Yang Telah Dilakukan Oleh Pegawai Yang Bersangkutan Ke Kas Umum Daerah;



Bangun, Guna, Serah (BGS) Dicatat Sebesar Nilai Aset Yang Diserahkan Oleh Pemerintah Kepada Pihak Ketiga/Investor Untuk Membangun Aset BGS Tersebut. Aset Yang Berada Dalam BGS Ini Disajikan Terpisah Dari Aset Tetap; Aset Bangun Guna Serah Yang Harus Disusutkan Tetap Disusutkan Sesuai Dengan Metode Penyusutan Yang Digunakan;

Penyerahan/Pengembalian Aset BGS Oleh Pihak Ketiga/Investor Kepada Pemerintah Daerah Pada Akhir Masa Perjanjian Sebagai Berikut :

Untuk Aset Yang Berasal Dari Pemerintah Daerah Dinilai Sebesar Nilai Tercatat Yang Diserahkan Pada Saat Aset Tersebut Dikerjasamakan Dan Disajikan Kembali Sebagai Aset Tetap;

Untuk Aset Yang Dibangun Oleh Pihak Ketiga Dinilai Sebesar Harga Wajar Pada Saat Perolehan/Penyerahan.

Aset Tak Berwujud Diukur Dengan Harga Perolehan, Yaitu Harga Yang Harus Dibayar Entitas Untuk Memperoleh Suatu Aset Tak Berwujud Hingga Siap Untuk Digunakan Dan Aset Tak Berwujud Tersebut Mempunyai Manfaat Ekonomi Yang Diharapkan Dimasa Datang Atau Jasa Potensial Yang Melekat Pada Aset Tersebut Akan Mengalir Masuk Kedalam Entitas Tersebut;

Aset Tidak Berwujud Disajikan Di Neraca Berdasarkan Nilai Bruto Setelah Dikurangi Amortisasi. Perhitungan Amortisasi Dilakukan Dengan Metode Garis Lurus Dengan Memperhatikan Berapa Tahun

Lamanya Nilai Manfaat (Umur) Ekonomis Diperoleh, Sehingga Perhitungannya Dengan Pendekatan Tahun Penuh (Tanpa Memperhatikan Bulan Perolehan Aset Tidak Berwujud). Sedangkan Pencatatannya Setiap Akhir Tahun.

No.	Jenis Aset Tak Berwujud	Estimasi Nilai Sisa (Rp)	Estimasi Masa Manfaat (Tahun)
1	Software & Aplikasi	1	4
2	Kajian-Kajian	1	5

Aset Lain-Lain Disajikan Dalam Neraca Sebesar Nilai Bukunya, Jika Masa Manfaat Sudah Habis Tetapi Belum Dihapuskan Maka Nilai Buku Aset Tak Berwujud Ditandai Rp 1,-;



Tata Cara Penghapusan Aset Tak Berwujud Akan Diatur Dalam Peraturan Kepala Daerah Tersendiri;

Aset Tak Berwujud Yang Dimaksud Software Adalah Aplikasi Komputer Yang Dibangun Atau Dibuat Oleh Pihak Ke-III (Tiga), Sedangkan Software Yang Dibeli Jadi, Dan Tanpa Software Tersebut Komputer Tidak Berfungsi Maka Harga Perolehan Softwarena Menjadi Bagian Harga Perolehan Aset Tetap (Komputer);

Kajian-Kajian Yang Dibuat SKPD Bisa Jadi Merupakan DED Dari Aset Tetap. Nilai DED Yang Aset Tetapnya Telah Jadi (Selesai Dibangun) Akan Dikapitalisasi Ke Aset Tetap Tersebut. Sedangkan DED Yang Belum Jadi Aset Tetapnya Masih Ada Di Aset Lainnya Tidak Diamortisasi;

Perbaikan *Software* (Aplikasi) Dapat Menambah Masa Manfaat, Kualitas Atau Kapasitas Aset Tetap Yang Bersangkutan;

Perbaikan Tersebut Meliputi :

Penyempurnaan, Merupakan Kegiatan Penambahan, Dan/Atau Penggantian Bagian Menu Aplikasi Dengan Maksud Meningkatkan Kualitas Dan/Atau Kapasitas;

Perbaikan Software/Aplikasi Yang Rusak Dengan Tetap Mempertahankan Arsitekturnya.

Kewajiban

Kewajiban Adalah Utang Yang Timbul Dari Peristiwa Masa Lalu Yang Penyelesaiannya Mengakibatkan Aliran Keluar Sumber Daya Ekonomi Pemerintah Daerah;

Kewajiban Dikategorisasikan Berdasarkan Waktu Jatuh Tempo Penyelesaiannya, Yaitu Kewajiban Jangka Pendek Dan Kewajiban Jangka Panjang. Pos-Pos Kewajiban Menurut PSAP Berbasis Akrual Nomor 09 Tentang Kewajiban Antara Lain :

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek Merupakan Kewajiban Yang Diharapkan Dibayar Dalam Waktu Paling Lama 12 Bulan Setelah Tanggal Pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek Antara Lain Utang Transfer Pemerintah Daerah, Utang Kepada



Pegawai, Utang Bunga, Utang Jangka Pendek Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang Adalah Kewajiban Yang Diharapkan Dibayar Dalam Waktu Lebih Dari 12 Bulan Setelah Tanggal Pelaporan. Selain Itu, Kewajiban Yang Akan Dibayar Dalam Waktu 12 Bulan Dapat Diklasifikasikan Sebagai Kewajiban Jangka Panjang Jika:

Jangka Waktu Aslinya Adalah Untuk Periode Lebih Dari 12 Bulan;

Entitas Bermaksud Untuk Mendanai Kembali (*Refinance*) Kewajiban Tersebut Atas Dasar Jangka Panjang;

Utang Beban Adalah Utang Pemerintah Daerah Yang Timbul Karena Pemerintah Daerah Telah Menerima Manfaat Barang/Jasa Sesuai Kontrak Pengadaan Barang /Jasa Atau Terbit Surat Penagihan (*Invoice*) Dari Pihak Ketiga Tetapi Sampai Dengan Tanggal Pelaporan Belum Dilakukan Pembayaran.

Utang Beban Terdiri Atas;

- Utang Beban Pegawai
- Utang Beban Barang Dan Jasa
- Utang Beban Bunga
- Utang Beban Subsidi
- Utang Beban Hibah
- Utang Beban Bantuan Sosial
- Utang Beban Transfer
- Utang Beban Lain-Lain

Laporan Operasional

Laporan Operasional Menyajikan Informasi Mengenai Seluruh Kegiatan Operasional Keuangan Entitas Pelaporan Yang Tercermin Dalam Pendapatan-LO, Beban, Dan Surplus/Defisit Operasional Dari Suatu Entitas Pelaporan Yang Penyajiannya Disandingkan Dengan Periode Sebelumnya. Pos-Pos Keuangan Yang Disajikan Dalam Laporan Operasional Meliputi Pendapatan LO, Beban, Transfer, Dan Pos Luar Biasa. Masing-Masing Unsur Dijelaskan Sebagai Berikut:
Pendapatan-LO



Pendapatan-LO Adalah Hak Pemerintah Kota Bekasi Yang Diakui Sebagai Penambah Ekuitas Dalam Periode Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Dan Tidak Perlu Dibayar Kembali.

Pendapatan-LO Diakui Pada Saat :

Timbulnya Hak Atas Pendapatan (*Earned*) Atau

Pendapatan Direalisasi Yaitu Aliran Masuk Sumber Daya Ekonomi (*Realized*)

Pengakuan Pendapatan-LO Dibagi Menjadi Dua Yaitu :

Pendapatan-LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Selama Tahun Berjalan

Pendapatan-LO Diakui Bersamaan Dengan Penerimaan Kas Dilakukan Apabila Dalam Hal Proses Transaksi Pendapatan Daerah Tidak Terjadi Perbedaan Waktu Antara Penetapan Hak Pendapatan Daerah Dan Penerimaan Kas Daerah. Atau Pada Saat Diterimanya Kas/Aset Non Kas Yang Menjadi Hak Pemerintah Daerah Tanpa Lebih Dulu Adanya Penetapan. Dengan Demikian, Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Kas Diterima Baik Disertai Maupun Tidak Disertai Dokumen Penetapan. Contohnya Pendapatan Non Kapitasi Dari BPJS, Diakui Saat Diterima Di Kas Daerah, Dan Di Catat Oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Bekasi.

Pendapatan-LO Diakui Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan

Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas

Pendapatan-LO Diakui Sebelum Penerimaan Kas Dilakukan Apabila Terdapat Penetapan Hak Pendapatan Daerah (Misalnya SKPD/SKRD Yang Diterbitkan Dengan Metode *Official Assesment* Atau Perpres/Permenkeu/Perwal) Dimana Hingga Akhir Tahun Belum Dilakukan Pembayaran Oleh Pihak Ketiga Atau Belum Diterima Oleh Pemerintah Daerah. Hal Ini Merupakan Tagihan (Piutang) Bagi Pemerintah Daerah Dan Utang Bagi Wajib Bayar Atau Pihak Yang Menerbitkan Keputusan/Peraturan.

Pendapatan-LO Diakui Setelah Penerimaan Kas

Apabila Dalam Hal Proses Transaksi Pendapatan Daerah Terjadi Perbedaan Antara Jumlah Kas Yang Diterima Dibandingkan Barang/Jasa Yang Belum Seluruhnya Diserahkan Oleh Pemerintah Daerah Kepada Pihak Lain, Atau Kas Telah Diterima Terlebih Dahulu. Atas Pendapatan-LO Yang Telah Diakui Saat



Kas Diterima Dilakukan Penyesuaian Dengan Pasangan Akun Pendapatan Diterima Dimuka.

Beban

Beban Adalah Penurunan Manfaat Ekonomi Atau Potensi Jasa Dalam Periode Pelaporan Yang Menurunkan Ekuitas, Yang Dapat Berupa Pengeluaran Atau Konsumsi Aset Atau Timbulnya Kewajiban.

Beban Diakui Pada:

Saat Imbulnya Kewajiban

Saat Timbulnya Kewajiban Artinya Beban Diakui Pada Saat Terjadinya Peralihan Hak Dari Pihak Lain Ke Pemerintah Daerah Tanpa Diikuti Keluarnya Kas Dari Kas Umum Daerah.

Saat Terjadinya Konsumsi Aset

Saat Terjadinya Konsumsi Asset Artinya Beban Diakui Pada Saat Pengeluaran Kas Kepada Pihak Lain Yang Tidak Didahului Timbulnya Kewajiban Dan/Atau Konsumsi Aset Non Kas Dalam Kegiatan Operasional Pemerintah Daerah.

Saat Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi Atau Potensi Jasa

Saat Terjadinya Penurunan Manfaat Ekonomi Atau Potensi Jas Aartinya Beban Diakui Pada Saat Penurunan Nilai Aset Sehubungan Dengan Penggunaan Aset Bersangkutan/Berlaluanya Waktu. Contoh Penurunan Manfaat Ekonomi Atau Potensi Jasa Adalah Penyusutan Atau Amortisasi.

Saat Disahkan Belanja Berdasarkan Laporan Dari SKPD Dan/Atau Badan Pengelola Dan/ Atau Penerima, Bagi Dana-Dana Non APBD (Tidak Diterima Melalui Rekening Kas Daerah).

Bila Dikaitkan Dengan Pengeluaran Kas Maka Pengakuan Beban Dapat Dilakukan Dengan Tiga Kondisi, Yaitu:

Beban Diakui Sebelum Pengeluaran Kas

Beban Diakui Sebelum Pengeluaran Kas Dilakukan Apabila Dalam Hal Proses Transaksi Pengeluaran Daerah Terjadi Perbedaan Waktu Antara Pengakuan Beban Dan Pengeluaran Kas, Dimana Pengakuan Beban Daerah Dilakukan Lebih Dulu, Maka Kebijakan Akuntansi Untuk Pengakuan Beban Dapat Dilakukan Pada Saat Terbit Dokumen Penetapan/Pengakuan Beban/Kewajiban Walaupun Kas Belum Dikeluarkan. Hal Ini Selaras Dengan Kriteria Telah Timbulnya Beban Dan



Sesuai Dengan Prinsip Akuntansi Yang Konservatif Bahwa Jika Beban Sudah Menjadi Kewajiban Harus Segera Dilakukan Pengakuan Meskipun Belum Dilakukan Pengeluaran Kas.

Beban Diakui Bersamaan Dengan Pengeluaran Kas

Beban Diakui Bersamaan Dengan Pengeluaran Kas Dilakukan Apabila Perbedaan Waktu Antara Saat Pengakuan Beban Dan Pengeluaran Kas Daerah Tidak Signifikan, Maka Beban Diakui Bersamaan Dengan Saat Pengeluaran Kas.

Beban Diakui Setelah Pengeluaran Kas

Beban Diakui Setelah Pengeluaran Kas Dilakukan Apabila Dalam Hal Proses Transaksi Pengeluaran Daerah Terjadi Perbedaan Waktu Antara Pengeluaran Kas Daerah Dan Pengakuan Beban, Dimana Pengakuan Beban Dilakukan Setelah Pengeluaran Kas, Maka Pengakuan Beban Dapat Dilakukan Pada Saat Barang Atau Jasa Dimanfaatkan Walaupun Kas Sudah Dikeluarkan. Pada Saat Pengeluaran Kas Mendahului Dari Saat Barang Atau Jasa Dimanfaatkan, Pengeluaran Tersebut Belum Dapat Diakui Sebagai Beban. Pengeluaran Kas Tersebut Dapat Diklasifikasikan Sebagai Beban Dibayar Di Muka (Akun Neraca), Aset Tetap Dan Aset Lainnya.

Pada Saat Penyusunan Laporan Keuangan Harus Dilakukan Penyesuaian Terhadap Pengakuan Beban, Yaitu:

Beban Pegawai, Diakui Timbulnya Kewajiban Beban Pegawai Berdasarkan Dokumen Yang Sah, Missal Daftar Gaji, Tetapi Pada Tanggal 31 Desember Tahun Berjalan Belum Dibayar.

Beban Barang Dan Jasa, Diakui Pada Saat Timbulnya Kewajiban Atau Peralihan Hak Dari Pihak Ketiga Yaitu Ketika Bukti Penerimaan Barang/Jasa Atau Berita Acara Serah Terima Ditandatangani Tetapi Pada Tanggal 31 Desember Tahun Berjalan Belum Dibayar. Dalam Hal Pada Akhir Tahun Masih Terdapat Barang Persediaan Yang Belum Terpakai, Maka Dicatat Sebagai Pengurang Beban.

Beban Penyusutan Dan Amortisasi, Diakui Saat Akhir Tahun/Periode Akuntansi Berdasarkan Metode Penyusutan Dan Amortisasi Yang Sudah Ditetapkan Dengan Mengacu Pada Bukti Memorial Yang Diterbitkan.



Beban Penyisihan Piutang, Diakui Saat Akhir Tahun/Periode Akuntansi Berdasarkan Persentase Cadangan Piutang Yang Sudah Ditetapkan Dengan Mengacu Pada Bukti Memorial Yang Diterbitkan.

Beban Bunga, Diakui Saat Bunga Tersebut Jatuh Tempo Untuk Dibayarkan. Untuk Keperluan Pelaporan Keuangan, Nilai Beban Bunga Diakui Sampai Dengan Tanggal Pelaporan Walaupun Saat Jatuh Tempo Melewati Tanggal Pelaporan.

Beban Transfer, Diakui Pada Saat Timbulnya Kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam Hal Pada Akhir Periode Akuntansi Terdapat Alokasi Dana Yang Harus Dibagihasikan Tetapi Belum Disalurkan Dan Sudah Diketahui Daerah Yang Berhak Menerima, Maka Nilai Tersebut Dapat Diakui Sebagai Beban Atau Yang Berarti Beban Diakui Dengan Kondisi Sebelum Pengeluaran Kas.

Beban Diukur Sesuai Dengan:

Harga Perolehan Atas Barang/Jasa Atau Nilai Nominal Atas Kewajiban Bebanyang Timbul, Konsumsi Aset, Dan Penurunan Manfaat Ekonomi Atau Potensi Jasa. Beban Diukur Dengan Menggunakan Mata Uang Rupiah.

Menaksir Nilai Wajar Barang/Jasa Tersebut Pada Tanggal Transaksi Jika Barang/Jasa Tersebut Tidak Diperoleh Harga Perolehannya.

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa Adalah Pendapatan Atau Beban Luar Biasa Yang Terjadi Karena Kejadian Atau Transaksi Yang Bukan Merupakan Operasi Biasa, Tidak Diharapkan Rutin Atau Sering Terjadi, Dan Berada Diluar Kendali Atau Pengaruh Entitas Bersangkutan.

Surplus/Deposit-LO

Surplus/Defisit-LO Adalah Selisih Antara Pendapatan-LO Dan Beban Selama Satu Periode Pelaporan, Setelah Diperhitungkan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Dan Pos Luar Biasa.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan Informasi Kenaikan Atau Penurunan Ekuitas Tahun Pelaporan Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan Sekurang-Kurangnya Pos-Pos Berupa Ekuitas Awal, Serplus/Defisit-LO Pada Periode Bersangkutan, Koreksi-Koreksi



Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Yang Disebabkan Oleh Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan Mendasar, Seperti Koreksi Kesalahan Mendasar Dari Persediaan Yang Terjadi Pada Periode-Periode Sebelumnya Dan Perubahan Nilai Aset Tetap Karena Revaluasi Aset Tetap. Unsur Tersebut Dijelaskan Sebagai Berikut:

Ekuitas Awal Adalah Kekayaan Bersih Awal Pemerintah Yang Merupakan Selisih Antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah.

Surplus/Defisit-LO Adalah Selisih Antara Pendapatan-LO Dan Beban Selama Satu Periode Pelaporan, Setelah Diperhitungkan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Dan Pos Luar Biasa.

Ekuitas Akhir Adalah Kekayaan Bersih Akhir Pemerintah Yang Merupakan Selisih Antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas Menyajikan Pos-Pos:

Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Adalah Kekayaan Bersih Awal Pemerintah Yang Merupakan Selisih Antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah.

Surplus/Defisit-LO Pada Periode Bersangkutan

Surplus/Defisit-LO Adalah Selisih Antara Pendapatan-LO Dan Beban Selama Satu Periode Pelaporan, Setelah Diperhitungkan Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Dan Pos Luar Biasa.

Koreksi Yang Langsung Menambah/Mengurangi Ekuitas, Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Yang Disebabkan Oleh Perubahan Kebijakan Akuntansi Dan Koreksi Kesalahan Mendasar, Seperti:

Koreksi Kesalahan Mendasar Dari Persediaan Yang Terjadi Pada Periode Sebelumnya;

Perubahan Nilai Aset Tetap Karena Revaluasi Aset Tetap.

Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Adalah Kekayaan Bersih Akhir Pemerintah Yang Merupakan Selisih Antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah.



BAB IV PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BEKASI

Catatan Atas Laporan Keuangan Meliputi Penjelasan Atau Daftar Terinci Atas Analisis Nilai Suatu Pos Yang Disajikan Dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk Pula Dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Adalah Penyajian Informasi Yang Diharuskan Dan Dianjurkan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Serta Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya Yang Diperlukan Untuk Penyajian Yang Wajar Atas Laporan Keuangan, Seperti Kewajiban Kontinjensi Dan Komitmen-Komitmen Lainnya. Pengungkapan Untuk Masing-Masing Pos Pada Laporan Keuangan Mengikuti Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Wali Kota Nomor 95 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

1. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran Disajikan Untuk Pos Pendapatan-LRA, Transfer, Belanja, Dan Pembiayaan Dengan Struktur Sebagai Berikut :

- Anggaran;
- Realisasi;
- Persentase Pencapaian;
- Penjelasan Atas Perbedaan Antara Anggaran Dan Realisasi;
- Perbandingan Dengan Periode Yang Lalu;
- Penjelasan Atas Perbedaan Antara Periode Berjalan Dengan Periode Yang Lalu;
- Rincian Lebih Lanjut Pendapatan-LRA Menurut Sumber Pendapatan;
- Rincian Lebih Lanjut Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi, Organisasi, Dan Fungsi;
- Rincian Lebih Lanjut Pembiayaan; Dan
- Penjelasan Hal-Hal Penting Yang Diperlukan.



2. Penjelasan Atas Neraca Disajikan Untuk Pos Aset, Kewajiban, Dan Ekuitas Dengan Struktur Sebagai Berikut:
 - Perbandingan Dengan Periode Yang Lalu;
 - Penjelasan Atas Perbedaan Antara Periode Berjalan Dan Periode Yang Lalu;
 - Rincian Lebih Lanjut Atas Masing-Masing Akun Dalam Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Aset Lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, Dan Ekuitas; Dan
 - Penjelasan Hal-Hal Penting Yang Diperlukan.
3. Penjelasan Atas Laporan Operasional Disajikan Untuk Pos Pendapatan-LO Dan Beban Dengan Struktur Sebagai Berikut:
 - Perbandingan Dengan Periode Yang Lalu;
 - Penjelasan Atas Perbedaan Antara Periode Berjalan Dan Periode Yang Lalu;
 - Rincian Lebih Lanjut Pendapatan-LO Menurut Sumber Pendapatan;
 - Rincian Lebih Lanjut Beban Menurut Klasifikasi Ekonomi, Organisasi, Dan Fungsi;
 - Penjelasan Hal-Hal Penting Yang Diperlukan.
4. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas Disajikan Untuk Ekuitas Awal Periode, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, Dan Ekuitas Akhir Periode Dengan Struktur Sebagai Berikut:
 - Perbandingan Dengan Periode Yang Lalu;
 - Penjelasan Atas Perbedaan Antara Periode Berjalan Dengan Periode Yang Lalu;
 - Rincian Yang Diperlukan; Dan
 - Penjelasan Hal-Hal Penting Yang Diperlukan.



4.1. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Anggaran LRA

Pendapatan-LRA Adalah Semua Penerimaan Rekening Kas Umum Daerah Yang Menambah Saldo Anggaran Lebih Dalam Periode Tahun Anggaran Yang Bersangkutan Yang Menjadi Hak Pemerintah Daerah Dan Tidak Perlu Dibayar Kembali Oleh Pemerintah Daerah.

LRA Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Merupakan Laporan Yang Menjelaskan Ikhtisar Sumber, Alokasi Dan Pemakaian Sumber Daya Ekonomi Yang Dikelola Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Yang Menggambarkan Perbandingan Antara Realisasi Dan Anggarannya Dalam Satu Periode Pelaporan. Dalam Penjelasan LRA Ini Akan Disajikan Sesuai Dengan Struktur APBD Yang Meliputi Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan.

- 4.1.1 BELANJA DAERAH 31 Desember 2023
31 Desember 2022
LRA Rp. 77.862.899.918,00 Rp. 19.894.788.947,00
Target Belanja Daerah LRA Tahun 2023 Sebesar Rp. 85.390.004.473,00. Terdapat Pos-Pos Belanja Yang Terealisasi Sebesar Rp. 77.862.899.918,00 Atau 91,19 %, Sedangkan Pada Tahun 2022 Pagu Belanja Daerah Sebesar Rp. 24.667.548.635,00 Dan Terealisasi Rp. 19.894.788.947,00 Atau 80,65%. Rincian Realisasi Belanja Adalah Sebagai Berikut :

Tabel 4. 1 Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Dan 2022

Dalam Rupiah

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Daerah	85.390.004.473,00	77.862.899.918,00	91,19	19.893.676.947,00
Belanja Operasi	80.460.630.473,00	77.857.199.918,00	96,76	19.861.451.947,00
Belanja Modal	4.929.374.000,00	5.700.000,00	0,12	32.225.000,00

Belanja Daerah Terdiri Atas Belanja Operasi:

- Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 80.460.630.473,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 77.857.199.918,00 Atau 96,76 % Dari Target Yang Ditetapkan..



- Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 4.929.374.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 5.700.000,00 Atau 0,12 % Dari Target Yang Ditetapkan.

4.1.1.1 . BELANJA OPERASI 31 Desember 2023
31 Desember 2022
Rp. 77.857.199.918,00 Rp. 13.903.179.177,00

Belanja Operasi Merupakan Belanja Yang Dianggarkan Untuk Kegiatan Sehari-Hari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Yang Memberi Manfaat Jangka Pendek, Pada Tahun 2023 Belanja Operasi Dianggarkan Sebesar Rp. 80.460.630.473,00 Dan Direalisasikan Sebesar Rp. 77.857.199.918,00 Atau 96,76 % Sedangkan Pada Tahun 2022 Belanja Operasi Sebesar Rp. 15.472.174.350,00. Direalisasikan Sebesar Rp. 13.903.179.177,00 Atau 89,86%. Belanja Operasi Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Dengan Perincian Sebagai Berikut:

Tabel 4. 2 Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 Dan 2022

Dalam Rupiah

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Operasi	80.460.630.473,00	77.857.199.918,00	96,76	19.861.451.947,00
Belanja Pegawai	8.894.620.000,00	7.943.269.130,00	89,30	8.500.715.974,00
Belanja Barang Dan Jasa	7.666.820.473,00	6.378.879.599,00	83,20	3.395.925.646,00
Belanja Hibah	63.899.190.000,00	63.535.051.189,00	99,43	7.964.810.327,00

Belanja Operasi Terdiri Atas Belanja Pegawai ,Belanja Barang Dan Jasa Dan Belanja Modal.

- Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 8.894.620.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 7.943.269.130,00 Atau 89,30% Dari Target Yang Ditetapkan
- Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 7.666.820.473,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp.



6.378.879.599,00 Atau 83,20% Dari Target Yang Ditetapkan.

- Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 63.899.190.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 63.535.051.189,00 Atau 99,43% Dari Target Yang Ditetapkan.

4.1.1.1.1

BELANJA PEGAWAI 31 Desember 202331 Desember 2022

Rp. 7.943.269.130,00 Rp. 8.500.715.974,00

Pada Akun Belanja Pegawai Sebesar Rp. 8.894.620.000,00 . Realisasi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Sebesar Rp. 7.943.269.130,00 (89,30%). Dengan Rincian Dapat Dijelaskan Pada Tabel Sebagai Berikut :

Tabel 4. 3 Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pegawai	8.894.620.000,00	7.943.269.130,00	89,30	8.500.715.974,00
Belanja Gaji Dan Tunjangan	2.701.160.000,00	2.481.047.414,00	91,85	2.576.323.003,00
Belanja Gaji Pokok ASN	2.088.065.000,00	1.957.944.900,00	93,77	2.027.159.600,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	196.301.000,00	175.259.188,00	89,28	185.821.952,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	198.752.000,00	169.695.000,00	85,38	172.350.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	24.096.000,00	11.200.000,00	46,48	11.200.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	63.655.000,00	50.650.000,00	79,57	57.690.000,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	123.734.000,00	112.178.580,00	90,66	117.320.400,00
Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus ASN	6.528.000,00	4.095.487,00	62,74	4.754.325,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.000,00	24.259,00	83,65	26.726,00
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	6.127.160.000,00	5.410.979.091,00	88,31	5.924.392.971,00



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	3.481.985.000,00	3.028.816.934,00	86,99	5.924.392.971,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	553.787.000,00	547.664.565,00	98,89	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	2.091.388.000,00	1.834.497.592,00	87,72	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	66.300.000,00	51.242.625,00	77,29	-
Belanja Honorarium	42.900.000,00	28.770.625,00	67,06	
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	23.400.000,00	22.472.000,00	96,03	

Belanja Pegawai Terdiri Atas Belanja Gaji , Tunjangan PNS Dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS Dan Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN .

- Belanja Gaji Dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.701.160.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 2.481.047.414,00 Atau 72,14% Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 6.127.160.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 5.410.979.091,00 Atau 88,31% Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 66.300.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 51.242.625,00 Atau 77,29% Dari Target Yang Ditetapkan.

**4.1.1.1.2 BELANJA BARANG
DAN JASA**

31 Desember 2023
Rp. 6.378.879.599,00

31 Desember 2022
Rp. 3.395.925.646,00



Belanja Barang Dan Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Dianggarkan Sebesar Rp. **7.600.775.485,00** Dan Terealisasi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. **6.378.879.599,00 (83,92%)**. Dapat Dijelaskan Pada Tabel Sebagai Berikut :

Tabel 4. 4 Belanja Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Barang Dan Jasa	7.600.775.485,00	6.378.879.599,00	83,92	3.395.925.646,00
Belanja Barang	2.842.455.460,00	2.438.966.358,00	85,80	1.359.795.436,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.908.500.448,00	2.438.966.358,00	83,86	1.359.795.436,00
Belanja Jasa	2.648.775.025,00	2.124.290.790,00	80,20	1.372.705.210,00
Belanja Jasa Kantor	1.881.789.000,00	1.635.268.777,00	86,90	1.246.249.279,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.764.625,00	27.564.213,00	99,28	22.005.931,00
Belanja Sewa Tanah	34.500.000,00	34.350.000,00	0,00	10.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	389.071.400,00	268.652.300,00	69,05	82.450.000,00
Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	295.650.000,00	138.455.500,00	46,83	12.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0
Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	79.845.000,00	99,81	84.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	80.000.000,00	79.845.000,00	99,81	84.950.000,00
Belana Perjalanan	2.029.545.000,00	1.735.777.451,00	85,53	578.475.000,00



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Dinas				
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.029.545.000,00	1.735.777.451,00	85,53	578.475.000,00

Belanja Barang Dan Jasa Terdiri Atas Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan Dan Belanja Perjalanan Dinas

- Belanja Barang Pada Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.842.455.460,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 1.518.256.958,00 Atau 53,41% Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 2.842.455.460,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 2.438.966.358,00 Atau 85,80% Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 80.000.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 79.845.000,00 Atau 99,81% Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 1.975.145.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 1.735.777.451,00 Atau 85,53% Dari Target Yang Ditetapkan..

4.1.1.1.2.1 BELANJA BARANG 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 2.438.966.358,00 Rp. 1.359.795.436,00

Belanja Barang Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Dianggarkan Sebesar Rp. 2.908.500.448,00 Dan Terealisasi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. 2.438.966.358,00 (83,86%) Dapat Dijelaskan Pada Tabel Sebagai Berikut :

Tabel 4. 5 Belanja Barang Tahun Anggaran 2023



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Barang	2.908.500.448,00	2.438.966.358,00	83,86	1.359.795.436,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.908.500.448,00	2.438.966.358,00	83,86	1.359.795.436,00
Belanja Bahan-Bahan Bangunan Dan Konstruksi	255.000,00	0,00	0,00	-
Belanja Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	143.288.000,00	97.978.898,00	68,38	106.261.336,00
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	572.000,00	572.000,00	100,00	-
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	7.274.448,00	5.440.460,00	74,79	0
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	100.000.000,00	99.950.000,00	99,95	74.920.200,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	63.160.000,00	59.374.000,00	94,01	87.146.400,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Kertas Dan Cover	40.790.000,00	38.390.000,00	94,12	89.066.250,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	2.400.000,00	2.200.000,00	91,67	8.800.000,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	5.250.000,00	0,00	0,00	-
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	42.525.000,00	28.800.000,00	67,72	108.787.500,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	581.000,00	345.000,00	59,38	410.996.250,00
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan	9.300.000,00	9.260.000,00	99,57	0



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Dinas				
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.430.000,00	5.750.000,00	89,42	0
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	315.962.000,00	224.323.000,00	71,00	0
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	5.008.000,00	5.008.000,00	100,00	4.410.000,00
Belanja Natura Dan Pakan-Natura	33.284.000,00	33.190.000,00	99,72	49.650.000,00
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat	836.330.000,00	726.502.000,00	86,87	376.467.500,00
Belanja Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	66.500.000,00	64.830.000,00	97,49	0
Belanja Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	218.650.000,00	209.338.000,00	95,74	0
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	72.490.000,00	72.090.000,00	99,45	0
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	94.820.000,00	94.200.000,00	99,35	0
Belanja Pakaian Batik Tradisional	12.960.000,00	12.920.000,00	99,69	0
Belanja Pakaian Olahraga	748.781.000,00	567.645.000,00	75,81	43.290.000,00
Belanja Pakaian Paskibraka	81.890.000,00	80.860.000,00	98,74	

- Belanja Bahan Pakai Habis Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp 2.908.500.448,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 2.438.966.358,00 Atau 83,86 % Dari Target Yang Ditetapkan.



4.1.1.1.2.2 BELANJA JASA 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. **2.124.290.790,00** Rp. 573.469.033,00

Belanja Jasa Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Dianggarkan Sebesar Rp. 2.648.775.025,00 Dan Terealisasi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. 2.124.290.790,00 (80,20%) Dapat Dijelaskan Pada Tabel Sebagai Berikut :

Tabel 4. 6 Belanja Jasa Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Jasa	2.648.775.025,00	2.124.290.790,00	80,20	1.372.705.210,00
Belanja Jasa Kantor	1.881.789.000,00	1.635.268.777,00	86,90	246.249.279,00
Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	595.850.000,00	418.550.000,00	70,24	126.990.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	592.800.000,00	568.800.000,00	95,95	541.800.000,00
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	519.375.000,00	512.817.377,00	98,74	518.700.379,00
Belanja Jasa Jalan/Tol	23.564.000,00	3.659.000,00	15,53	3.900.000,00
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemotretan	106.600.000,00	104.000.000,00	97,56	0,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	20.000.000,00	18.370.000,00	91,85	50.000.000,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	20.000.000,00	5.472.400,00	27,36	4.858.900,00
Belanja Medical Check Up	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	0



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	27.764.625,00	27.564.213,00	99,28	22.005.931,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	24.960.000,00	24.759.588,00	99,20	19.404.211,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1.246.500,00	1.246.500,00	100,00	1.156.320,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1.558.125,00	1.558.125,00	100,00	1.445.400,00
Belanja Sewa Tanah	34.500.000,00	34.350.000,00	99,57	10.000.000,00
Belanja Sewa Lapangan Lainnya	34.500.000,00	34.350.000,00	99,57	10.000.000,00
Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin	389.071.400,00	268.652.300,00	69,05	82.450.000,00
Belanja Sewa Electric Generating Set	7.500.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	98.000.000,00	95.716.000,00	97,67	41.700.000,00
Belanja Sewa Mebel	56.000.000,00	33.237.900,00	59,35	0
Belanja Sewa Alat Pendingin	36.000.000,00	35.764.200,00	99,35	0
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	191.571.400,00	103.934.200,00	54,25	35.750.000,00
Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan	295.650.000,00	138.455.500,00	46,83	12.000.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	67.500.000,00	66.455.500,00	98,45	12.000.000,00
Belanja Sewa Taman	228.150.000,00	72.000.000,00	31,56	0
Belanja	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan				
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	0

- Belanja Jasa Kantor Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp **1.881.789.000,00** Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. **1.635.268.777,00** Atau **86,90%** Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp 27.764.625,00 ,Telah Terealisasi Sebesar Rp. 27.564.213,00 Atau 99,28% Dari Target Yang Ditetapkan,.
- Belanja Sewa Tanah Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp 34.500.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 34.350.000,00 Atau 99,57 % Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Sewa Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp 389.071.400,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 268.652.300,00 Atau 69,05% Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Sewa Gedung Dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp 265.650.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 138.455.500,00 Atau 46,83 % Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Pelatihan Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp 20.000.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 20.000.000,00 Atau **100%** Dari Target Yang Ditetapkan.

4.1.1.1.2.3 BELANJA PEMELIHARAAN 31 Desember 2023 Rp. **79.845.000,00** 31 Desember 2022 Rp. 84.950.000,00,00



Belanja Pemeliharaan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Dianggarkan Sebesar **Rp. 80.000.000,00** Dan Terealisasi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023 Sebesar **Rp. 79.845.000,00 (99,81%)** Dapat Dijelaskan Pada Tabel Sebagai Berikut :

Tabel 4. 7 Belanja Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Pemeliharaan	80.000.000,00	79.845.000,00	99,81	84.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	80.000.000,00	79.845.000,00	99,81	84.950.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	20.000.000,00	19.940.000,00	99,70	24.977.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	30.000.000,00	29.905.000,00	99,68	19.973.000,00
Belanja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	25.000.000,00



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer				
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Terdiri Atas Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin.

- Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 80.000.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. **79.845.000,00** Atau **99,81%** Dari Target Yang Ditetapkan. Hal Ini Sudah Sesuai Dengan Alokasi Yang Ada.

4.1.1.1.2.4	BELANJA	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	PERJALANAN	Rp. 1.735.777.451,00	Rp. 578.475.000,00
	DINAS		

Belanja Perjalanan Dinas Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Dianggarkan Sebesar Rp. **2.029.545.000,00** Dan Terealisasi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp. **1.735.777.451,00** (**77,54%**) Dapat Dijelaskan Pada Tabel Sebagai Berikut :

Tabel 4. 8 Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belana Perjalanan Dinas	2.029.545.000,00	1.735.777.451,00	85,53	578.475.000,00



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.029.545.000,00	1.735.777.451,00	85,53	578.475.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	259.800.000,00	188.991.451,00	72,74	60.660.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	463.200.000,00	388.020.000,00	83,77	600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	638.309.000,00	524.316.000,00	82,14	297.755.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	668.236.000,00	634.450.000,00	94,94	219.460.000,00

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. **2.029.545.000,00** Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. **1.735.777.451,00** Atau **85,53%** Dari Target Yang Ditetapkan. \

4.1.1.2 Belanja Hibah 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. **63.535.051.189,00** Rp. 7.964.810.327,00

Belanja Hibah Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Dianggarkan Sebesar Rp. **63.899.190.000,00** Dan Terealisasi Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023 Sebesar Rp . **63.535.051.189,00 (99,43%)** Dapat Dijelaskan Pada Tabel Sebagai Berikut :

Tabel 4. 9 Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Hibah	63.899.190.000,00	63.535.051.189,00	99,43	2.018.321.000,00
Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	46.002.585.000,00	46.002.585.000,00	100,00	0
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi	9.506.585.000,00	9.506.585.000,00	100,00	0
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi	36.496.000.000,00	36.496.000.000,00	100,00	0
Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	9.555.000.000,00	9.190.861.189,00	96,19	350.000.000,00
Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.200.000.000,00	6.185.861.189,00	99,77	0
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kota Bekasi	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	0
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	0
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	0
Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi	600.000.000,00	585.861.189,00	97,64	0
Belanja Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.355.000.000,00	3.005.000.000,00	89,57	600.000.000,00



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Angkatan Muda Siliwangi (AMS) 025 Kota Bekasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Kota Bekasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
Brigade 08 Dewan Pimpinan Cabang Kota Bekasi	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	
DPC Brigade Anak Serdadu Kota Bekasi	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
DPC Baladhika Karya Kota Bekasi	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
DPC Barisan Nasional Patriot Sejati Indonesia (BANASPATI) Kota Bekasi	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
LSM Komando Pejuang Merah Putih (KPMP) Kota Bekasi	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	
DPC Krida Wanita Swadiri Indonesia Kota Bekasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
DPP Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah (LP2KP) Kota Bekasi	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
Forum Komunikasi Anak Betawi (FORKABI) Kota Bekasi	150.000.000,00	0,00	0,00	
DPD Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP) Kota Bekasi	80.000.000,00	80.000.000,00	100,00	
Kastri Kota Bekasi	200.000.000,00	0,00	0,00	
DPC Legium Veteran Republik Indonesia Kota Bekasi	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	
Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia (LAMI) Kota Bekasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00	
LP Tipikor Nusantara Kota Bekasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
MPC Pemuda Pancasila Kota Bekasi	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
Persekutuan Gereja Gereja Indonesia Setempat (PGIS) Kota Bekasi	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	
DPD Topan - RI Kota Bekasi	75.000.000,00	75.000.000,00	100,00	
DPW Vox Point Indonesia Kota Bekasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
Yayasan Peduli Kasih Kota Bekasi	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	
Lembaga Mustika Hijau Rumah Barokah Kota Bekasi	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	
Lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia Kota Bekasi	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8.341.605.000,00	8.341.605.000,00	100,00	1.668.321.000,00
Belanja Hibah Berupa Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	8.341.605.000,00	8.341.605.000,00	100,00	1.668.321.000,00
Partai PPP	503.827.500,00	503.827.500,00	100,00	
Partai Demokrat	554.115.000,00	554.115.000,00	100,00	
Partai GERINDRA	1.081.260.000,00	1.081.260.000,00	100,00	
Partai Golkar	1.342.125.000,00	1.342.125.000,00	100,00	
Partai PAN	637.807.500,00	637.807.500,00	100,00	
Partai PDI Perjuangan	1.805.460.000,00	1.805.460.000,00	100,00	
Partai PKB	412.035.000,00	412.035.000,00	100,00	
Partai PKS	2.004.975.000,00	2.004.975.000,00	100,00	

- Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. **46.002.585.000,00** Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. **46.002.585.000,00** Atau 100% Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran



Sebesar Rp. 6.200.000.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 6.185.861.189,00 Atau **99,77** % Dari Target Yang Ditetapkan.

- Belanja Hibah Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 3.055.000.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 3.005.000.000,00 Atau **89,57**% Dari Target Yang Ditetapkan.
- Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 8.341.605.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 8.341.605.000,00 Atau **100** % Dari Target Yang Ditetapkan.

4.1.2.2. Belanja Modal 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. **5.700.000,00** Rp. 32.225.000,00

Belanja Modal Merupakan Belanja Yang Dianggarkan Untuk Perolehan Aset Tetap Dan Aset Lainnya Yang Memberi Manfaat Lebih Dari Satu Periode Akuntansi. Pada Tahun 2023 Dianggarkan Sebesar Rp. **4.929.374.000** Dan Sampai Dengan Tahun Anggaran 2023 Terealisasi Sebesar Rp. **5.700.000,00** Atau **0,12** %, Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Tabel 4. 10 Belanja Modal Tahun 2023

Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
BELANJA MODAL	4.929.374.000	5.700.000	0,12	33.337.000
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	4.929.374.000	5.700.000	0,12	33.337.000
Belanja Modal Alat Kantor Dan Rumah Tangga	-	-	-	33.337.000
Belanja Modal Alat Kantor	-	-	-	33.337.000
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.923.600.000	-	-	-
Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	4.923.600.000	-	-	-
Belanja Modal Peralatan Komputer	5.774.000	5.700.000	98,72	



Uraian	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2023 (Rp)	%	Realisasi Anggaran Tahun 2022 (Rp)
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	5.774.000	5.700.000,00	98,72	

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Terdiri Atas Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone

- Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. 4.923.600.000,00 Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. 0,00 Atau 0% , Dari Target Yang Ditetapkan
- Belanja Modal Peralatan Komputer Tahun Anggaran 2023 Memiliki Pagu Anggaran Sebesar Rp. **5.774.000,00** Dan Telah Terealisasi Sebesar Rp. **5.700.000,00** Atau **98,72** % , Dari Target Yang Ditetapkan

4.2.2. SURPLUS/(DEFISIT) 31 Desember 2023 31 Desember 2022
LRA (Rp. 77.862.899.918,00) (Rp. 19.893.676.947,00)

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Pada Tahun 2023 Dengan Pagu Anggaran (Rp. 85.390.004.473,00) Dan Surplus/(Defisit) Sebesar (Rp. 77.862.899.918,00) Atau Sebesar 91,19%.

4.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Terdiri Dari Pos-Pos Yang Menggambarkan Kondisi Mengenai Harta Atau Aset, Kewajiban Dan Ekuitas Pada Tanggal Tertentu. Neraca Menunjukkan Harta Atau Aset Diperoleh Dengan Bersumber Dari Dana Yang Berasal Dari Kewajiban Dan Kekayaan Sendiri Atau Ekuitas. Posisi Keuangan Per 31 Desember 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Secara Umum Sebagai Berikut:

Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 3.309.663.671,00 Terdiri Dari Aset Lancar Sebesar Rp. 5.315.000,00, Investasi Jangka Panjang Sebesar Rp.0,00, Aset Tetap Sebesar Rp. 3.232.819.834,00 Serta Aset Lainnya Sebesar Rp. 71.528.837,00.



4.2.1 Aset 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. **3.309.663.671,00** Rp. 513.552.712,00

Aset Adalah Sumber Daya Ekonomi Yang dikuasai Dan/Atau Dimiliki Oleh Pemerintah Sebagai Akibat Dari Peristiwa Masa Lalu Dan Dari Masa Manfaat Ekonomi Dan/Atau Sosial Di Masa Depan Diharapkan Dapat Diperoleh Baik Oleh Pemerintah Maupun Masyarakat Serta Dapat Diukur Dalam Satuan Uang Termasuk Sumber Daya Non Keuangan Yang Diperlukan Untuk Penyediaan Jasa Bagi Masyarakat Umum Dan Sumber-Sumber Daya Yang Dipelihara Karena Alasan Sejarah Dan Budaya. Aset Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Per 31 Desember 2023 Adalah Sebesar Rp. **3.309.663.671,00**.

Tabel 4. 11 Rekapitulasi Aset Per 31 Desember 2023 Dan Desember 2022

JENIS ASET	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	(Rp)	(Rp)
Aset Lancar	5.315.000,00	7.910.400,00
Investasi Jangka Panjang	0	0
Aset Tetap	3.232.819.834,00	2.850.487.682,00
Aset Lainnya	71.528.837,00	71.528.837,00
Total	3.309.663.671,00	2.929.926.919,00

Jumlah Aset Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. **3.309.663.671,00** Dari Desember Tahun 2022 Sebesar Rp. **2.929.926.919,00**.

4.2.1.1 Aset Lancar 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 5.315.000,00 Rp. 17.543.800,00

Aset Lancar Meliputi Kas Dan Setara Kas, Investasi Jangka Pendek, Piutang Dan Persediaan Yang Dimiliki Pemerintah Daerah Kota Bekasi. Suatu Aset Diklasifikasikan Sebagai Aset Lancar Jika Diharapkan Segera Untuk Dapat Direalisasikan Atau Dimiliki Atau Untuk Dipakai Atau Dijual Dalam Waktu 6 (Enam) Bulan Sejak Tanggal Pelaporan. Aset Lancar Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023 Sebesar Rp. 5.315.000,00 Yang



Terdiri Kas Di Bendahara Pengeluaran Sebsar Rp. 0,- Persediaan Sebesar Rp. 5.315.000,00.

4.2.1.1.1	Kas Di Bendahara Pengeluaran	<u>31 Desember 2023</u> Rp. 0,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp0,00
-----------	------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------

Pada Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Terdapat Saldo Kas Sebesar Rp. 0,00, Terdiri Dari Saldo Kas Di Bank Sebesar Rp. 0,00.

4.2.1.1.2	Persediaan	<u>31 Desember 2023</u> Rp. 5.315.000,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp. 7.910.400,00
-----------	------------	---	---

Persediaan Bahan Habis Pakai/Material Adalah Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Listrik Dan Elektronik(Lampu Pijar, Battery Kering), Barang Cetakan, Pakai Habis Perlengkapan Komputer /Printer ,Dan Inventaris Peralatan/Perlengkapan Kantor Yang Dihitung Berdasarkan *Stock Opname* Pada Bendahara Barang.

Persediaan Dicatat Dengan Metode Perpetual, Di Mana Jumlah Persediaan Akhir Dapat Diketahui Setiap Saat Karena Setiap Pengadaan Persediaan Langsung Dicatat Pada Persediaan Dan Penggunaan Persediaan Dicatat Setiap Ada Transaksi. Penilaian Persediaan Dinilai Dengan Metode FIFO (*First In First Out*), Di Mana Harga Pokok Dari Barang-Barang Yang Pertama Kali Dibeli Akan Menjadi Harga Barang Yang Digunakan Pertama Kali.

Persediaan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Per 31 Desember 2023 Merupakan Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering), Barang Cetakan, Pakai Habis Perlengkapan Komputer /Printer ,Dan Inventaris



Peralatan/Perlengkapan Kantor Senilai Rp. 5.315.000,00 Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tabel 4. 12 Rekapitulasi Persediaan PER 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
PERSEDIAAN		
Barang Pakai Habis	5.315.000,00	7.910.400,00
Bahan	0	0
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.315.000,00	7.910.400,00
Obat-Obatan	0	0
Natura Dan Pakan	0	0

Persediaan Meliputi Barang Pakai Habis. Nilai Barang Pakai Habis Diperoleh Dari Hasil Perhitungan Fisik Dan Harga Pengadaan Barang Terakhir Berdasarkan Berita Acara Hasil Stock Opname Persediaan Nilai Persediaan Per-31 Desember 2023 Sebesar Rp. 5.315.000,00 Dengan Rincian Sebagai Berikut:

Tabel 4. 13 Rincian Barang Pakai Habis Per Jenis Tahun Per 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Barang Pakai Habis	5.315.000,00	7.910.400,00
Bahan	0	0
Isi Tabung Gas	0	0
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	5.315.000,00	7.910.400,00
Alat Tulis Kantor	313.000,00	1.666.900,00
Kertas Dan Cover	4.484.000,00	4.484.000,00
Benda Pos	0,00	0,00
Bahan Komputer	518.000,00	1.731.500,00



Bangunan		
Jalan,Irigasi Dan Jaringan	-	-
Aset Tetap Lainnya	2.136.000,00	2.136.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-
Akumulasi Penyusutan	(12.942.170.630,60)	(12.337.205.222,60)

4.2.1.2.1 Peralatan Dan Mesin 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. **16.133.431.464,60** Rp. 15.185.556.904,60

Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Yang Dikelola Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi PER 31 Desember 2023 Dan 2022 Masing-Masing Sebesar Rp. **16.133.431.464,60** Dan Rp. 15.185.556.904,60. Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Selama Periode 1 Januari 2023 Sampai Dengan 31 Desember 2023 Adalah Sebagai Berikut:

Tabel 4. 15 Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Alat Besar	4.000.000,00
2	Alat Angkutan	14.246.550.052,60
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.269.311.650,00
4	Alat Studio , Komunikasi Dan Pemancar	62.734.972,00
5	Komputer	590.257.790,00
	Total	16.172.854.464,60

Tabel 4. 16 Rekapitulasi Aset Tetap Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2023 Dan 2022

NO.	URAIAN	PERALATAN MESIN (Rp)	JUMLAH
1	Saldo Awal 2023		15.185.556.904,60
		Ekstra Kompatabel	-



		Semester Satu Tahun 2022	
2	Saldo Semester Satu Tahun 2023		15.465.786.904,60
3	Mutasi Masuk	Belanja Modal 2023	5.700.000,00
		Barang Masuk Dari SKPD Lain	981.597.560,00
		Terima Dari Aset Lainnya Ke Ekstra Kompatabel	
	Jumlah Mutasi Masuk		987.297.560,00
4	Mutasi Keluar	Barang Keluar Ke SKPD Lain	0,00
		Penghapusan	
	Jumlah Mutasi Keluar		0,00
5	Saldo Akhir 31 Desember 2023		16.172.854.464,60

Adapun Penjelasan Atas Mutasi Masuk Dan Mutasi Keluar
Sebagai Berikut :

Mutasi Masuk :

No	Uraian	Jumlah
1	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 02 Januari 2023 Dengan No BA : 024/BAST 534-Setwan.Umum Dengan Nilai Rp. 219.150.000,-	219.150.000,00
2	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 15 Mei 2023 Dengan No BA : 027/BAST 233- SETDA.PLK Dengan Nilai Rp. 9.980.000,-	9.980.000,00
3	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 22 Mei 2023 Dengan No BA : 027/BAST 257- SETDA.PLK Dengan Nilai Rp. 19.100.000,-	19.100.000,00
4	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 27 Juli 2023 Dengan No BA : 027/BAST 462- SETDA.PLK (Meja Kerja Pegawai Dengan Jumlah 45 Unit X Rp. 3.710.000,- = Rp. 166.950.000,- Dankursikerjapegawai Denganjumlah 35 Unit	231.980.000,00



No	Uraian	Jumlah
5	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 28 Agustus 2023 Dengan No BA : 027/BAST 558-SETDA.PLK (Meja Rapat Dengan Jumlah 3Unit X Rp. 6.700.000,- =Rp.20.100.000,- Dankursirapatdenganjumlah125unitx550.000,- =RP.68.750.000	88.850.000,00
6	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 28 Agustus 2023 Dengan No BA : 027/BAST 584-SETDA.PLK (Meja Eselon II,III IV Rp. 149.700.000,- Dan Kursi Eselon II,III Dan IV Rp. 67.600.000,-	217.300.000,00
7	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 28 Agustus 2023 Dengan No BA : 027/BAST 532-SETDA.PLK (Mejatamu Rp.11.282.040,- ,Sofa 1,2,3 Rp. 85.394.520,-)	96.676.560,00
8	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 20 September 2023 Dengan No BA : 027/BAST 686-SETDA.PLK TV LED 50" =RP. 13.390.000,-	13.390.000,00
9	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Bagian Perlengkapan Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 15 Desember 2023 Dengan No BA : 027/BAST 952-SETDA.PLK Dengan Nilai Rp. AC 1 PK Rp.3.732.000,- Dan AC 2 Pk Rp. 6.821.000, Jumlah Rp. 10.553.000,-	10.553.000,00
10	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 31 Mei 2023 Dengan No BA : 027/BAST 297-SETDA.PLK Dengan Nilai Rp. 32.000.000,-	32.000.000,00
11	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Bappelitbangda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 25 Juli 2023 Dengan No BA : 028/2066-BA.STBI/Bappelitbangda.Set Laptop: Rp. 19.448.000,-	19.448.000,00
12	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin Dari Setda Ke Kesbangpol Pada Tanggal 17 Oktober 2023 Dengan No BA : 027/BAST 781-SETDA.PLK Laptop Sebanyak 2 X 4.360.000,- =Rp. 8.720.000,-	8.720.000,00
13	JP Mutasi Masuk Aset Peralatan Dan Mesin	14.450.000,00



No	Uraian	Jumlah
	Dari Inspektorat Ke Kesbangpol Pada Tanggal 30 Oktober 2023 Dengan No BA : 024/BAST.368/ITKO Laptop Rp. 14.450.000,-	
14	Pembayaranpekerjaan Belanja Modal Dan Peralatan Komputer Lainnya Sesuaidengan SP : 602.21/SP.3800-BM.Hardisk.Kesbaormas Tglsp15desember2023 Pada Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Ketahanan Ekonomi Sumber Dana Transfer Antar Daerah - Bagihasilpajak	5.700.000,00
JUMLAH		987.297.560,00

4.2.1.2.2 Aset Tetap 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Lainnya Rp. 2.136.000,00 Rp.2.136.000,00

Jumlah Tersebut Merupakan Saldo Nilai Aset Tetap Lainnya Yang Berupa Buku Dan Perputakaan Yang Dimiliki Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Sampai Tanggal 31 Desember 2023 Masih Sebesar Rp. 2.136.000,00.

Tabel 4. 17 Rekapitulasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	2.136.000,00
	Total	2.136.000,00

4.2.1.2.3 Akumulasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Penyusutan (Rp. 12.942.170.630,60) (Rp. 12.337.205.222,60)

Akumulasi Penyusutan Merupakan Nilai Penyusutan Dari Peralatan Dan Mesin Yang Mengurangi Nilai Buku Dari Masing-Masing Aset Peralatan Dan Mesin. Berikut Perincian Perubahan Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi PER 31 Desember 2023 Tahun Anggaran 2023:



JENIS ASET LAINNYA	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Aset Lain-Lain	171.367.987,00	171.367.987,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(99.839.150,00)	(99.839.150,00)
Total	71.528.837,00	71.528.837,00

4.2.1.3.1	Aset Lain- Lain	<u>31 Desember 2023</u> Rp.171.367.987,00	<u>31 Desember 2022</u> Rp.171.367.987,00
-----------	--------------------	--	--

Jumlah Tersebut Merupakan Saldo Nilai Aset Lain-Lain Yang Berupa *Reclass* Dari Aset Tetap Yang Sudah Rusak Berat Atau Telah Dilakukan Usulan Penghapusan. Pada Tanggal 31 Desember 2023.

Tabel 4. 20 Rekapitulasi Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Aset Lain-Lain	171.367.987,00
	Total	171.367.987,00

4.2.1.3.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	<u>31 Desember 2023</u> (Rp.99.839.150,00)	<u>31 Desember 2022</u> (Rp.99.839.150,00)
-----------	---	---	---

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Merupakan Nilai Penyusutan Dari Aset Tetap Yang Direklasifikasi Ke Aset Lainnya Dari Peralatan Dan Mesin. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Per 30 Juni Tahun Anggaran 2022 Sebesar (Rp.99.839.150,00).

Tabel 4. 21 Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya PER 31 Desember 2023

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset	(99.839.150,00)



NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Lainnya	
	Total	(99.839.150,00)

4.2.3 Ekuitas **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp. 3.309.663.671,00 **Rp. 2.929.926.919,00**

Ekuitas Adalah Kekayaan Bersih Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Yang Merupakan Selisih Antara Aset Dan Kewajiban. Ekuitas Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. **3.309.663.671,00**.

4.3 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) Menyediakan Informasi Mengenai Seluruh Kegiatan Operasional Keuangan Entitas Pelaporan Yang Tercerminkan Dalam Pendapatan-LO. Beban. Dan Surplus/ Defisit Operasional Dari Suatu Entitas Pelaporan Yang Penyajiannya Disandingkan Dengan Periode Sebelumnya.

Laporan Operasional Disusun Untuk Melengkapi Pelaporan Dari Siklus Akuntansi Berbasis Akrua. Sehingga Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Dan Neraca Mempunyai Keterkaitan Yang Dapat Dipertanggungjawabkan.

4.3.1 Beban **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp. 77.915.739.893,00 **Rp. 20.164.727.176,00**

Beban Merupakan Penurunan Manfaat Ekonomi Atau Potensi Jasa Dalam Periode Pelaporan Yang Menurunkan Ekuitas. Yang Dapat Berupa Pengeluaran Atau Konsumsi Asset Atau Timbulnya Kewajiban.

Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi PER 31 Desember 2023 Jumlah Beban Sebesar Rp. **78.413.739.893,00** Terdiri Dari :



4.3.1.1	Beban Operasi	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		Rp. 78.413.739.893,00	Rp. 20.262.672.434,00

Beban Operasi Merupakan Beban Atau Pengeluaran Yang Digunakan Untuk Kegiatan Sehari-Hari Pemerintah Yang Memberi Manfaat Jangka Pendek. Beban Operasi Ini Meliputi Beban Pegawai Sebesar Rp. 7.943.269.130,00, Beban Persediaan Sebesar Rp. 191.629.860,00, Beban Jasa Sebesar Rp. 2.124.290.790,00, Beban Barang Sebesar Rp. 2.250.636.898,00, Beban Pemeliharaan Sebesar Rp. 79.845.000,00, , Beban Perjalanan Dinas Sebesar Rp. 1.735.777.451,00, Beban Hibah Sebesar Rp 63.535.051.189,00 , Beban Penyusutan Sebesar Rp. 553.239.575,00.

Tabel 4. 22 Beban Operasi – LO Per 31 Desember 2023 Dan 31 Desember 2022

Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
BEBAN OPERASI - LO	78.413.739.893,00	20.262.672.434,00
Beban Pegawai	7.943.269.130,00	8.500.715.974,00
Beban Persediaan	191.629.860,00	356.373.550,00
Beban Jasa	2.124.290.790,00	1.372.705.210,00
Beban Barang	2.250.636.898,00	1.013.055.286,00
Beban Pemeliharaan	79.845.000,00	84.950.000,00
Beban Perjalanan Dinas	1.735.777.451,00	578.475.000,00
Beban Hibah - LO	63.535.051.189,00	7.993.321.000,00
Beban Penyusutan - LO	553.239.575,00	391.587.087,00

4.3.1.1.1	Beban Pegawai – LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		Rp. 7.943.269.130,00	Rp. 8.500.715.974,00

Beban Pegawai-LO Merupakan Kompensasi Terhadap Pegawai Baik Dalam Bentuk Uang Atau Barang Yang Harus Dibayarkan Kepada Pejabat Negara Maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sebagai Imbalan Atas



Pekerjaan Yang Telah Dilaksanakan. Beban Pegawai-LO Ini Berupa Gaji Pokok Dan Tunjangan Yang Melekat Pada Gaji Serta Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi.

Beban Pegawai-LO Disajikan Dengan Basis Akrual. Pengakuan Beban Pegawai Terjadi Pada Saat Timbulnya Kewajiban, Sehingga Nilai Beban Pegawai-LO Sebesar Belanja Pegawai Yang Dibayarkan Pada Tahun Anggaran 2023.

Jumlah Beban Pegawai Hingga 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 7.943.269.130,00 Dengan Perincian Sebagai Berikut:

Tabel 4. 23 Rekapitulasi Beban Pegawai-Lo Per 31 Desember 2023 Dan 31 Desember 2022

Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Beban Pegawai	7.943.269.130,00	8.500.715.974,00
Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	1.957.944.900,00	2.027.159.600,00
Beban Tunjangan Keluarga - LO	175.259.188,00	185.821.952,00
Beban Tunjangan Jabatan - LO	169.695.000,00	172.350.000,00
Beban Tunjangan Fungsional - LO	11.200.000,00	11.200.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO	50.650.000,00	57.690.000,00
Beban Tunjangan Beras - LO	112.178.580,00	117.320.400,00
Beban Tunjangan Pph / Tunjangan Khusus - LO	4.095.487,00	4.754.325,00



Beban	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Beban Pembulatan Gaji - LO	24.259,00	26.726,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	3.028.816.934,00	5.924.392.971,00
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN - LO	547.664.565,00	-
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN - LO	1.834.497.592,00	-
Beban Honorarium	28.770.625,00	-
Beban Jasa Pengelolaan BMD	22.472.000,00	-

4.2.2.1.2 Beban Persediaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 191.629.860,00 Rp. 356.373.550,00

Beban Persediaan Merupakan Penurunan Manfaat Ekonomi Dalam Periode Pelaporan Yang Menurunkan Ekuitas Yang Dapat Berupa Pengeluaran Atau Konsumsi Aset Atau Timbulnya Kewajiban Akibat Transaksi Pengadaan Barang Yang Habis Pakai. Beban Persediaan Diakui Ketika Bukti Penerimaan Barang Atau Berita Acara Serah Terima Ditandatangani.

Saldo Beban Persediaan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Hingga 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 191.629.860,00 Dengan Perincian Sebagai Berikut:

Tabel 4. 24 Rekapitulasi Beban Persediaan PER 31 Desember 2023



Saldo Beban Jasa Hingga 31 Desember 2023
Sebesar Rp. 2.124.290.790,00 Dengan Perincian Sebagai
Berikut:

Tabel 4. 25 Rekapitulasi Beban Jasa PER 31 Desember 2023

JENIS BEBAN JASA-LO	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, Dan Panitia	418.550.000,00
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	568.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	512.817.377,00
Beban Jasa Jalan/Tol	3.659.000,00
Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, Dan Pemetretan	104.000.000,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	18.370.000,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, Dan Perizinan	5.472.400,00
Beban Medical Check Up	3.600.000,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	24.759.588,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	1.246.500,00
Beban Iuran Jaminan Kematian Bagi Non ASN	1.558.125,00
Beban Sewa Lapangan Lainnya	34.350.000,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	95.716.000,00
Beban Sewa Mebel	33.237.900,00
Beban Sewa Alat Pendingin	35.764.200,00
Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	103.934.200,00
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	66.455.500,00
Beban Sewa Taman	72.000.000,00
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	20.000.000,00
Jumlah	2.124.290.790,00

4.2.2.1.4 Beban Barang 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 2.250.636.898,00 Rp. 1.013.055.286,00

Beban Barang Merupakan Penurunan Manfaat Ekonomi Dalam Periode Pelaporan Yang Menurunkan Ekuitas, Yang Dapat Berupa Pengeluaran Atau Konsumsi Aset Atau Timbulnya Kewajiban Akibat Transaksi Pengadaan Barang, Seperti Makanan Dan Minuman, Pakaian, Dokumen Pengadaan Serta Penggandaan. Beban



Barang Diakui Ketika Bukti Penerimaan Barang Atau Berita Acara Serah Terima Ditandatangani.

Saldo Beban Barang Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Hingga 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 2.250.636.898,00 Dengan Perincian Sebagai Berikut:

Tabel 4. 26 Rekapitulasi Beban Barang PER 31 Desember 2023

JENIS BEBAN BARANG	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Makanan Dan Minuman Rapat	726.502.000,00
Beban Makanan Dan Minuman Jamuan Tamu	64.830.000,00
Beban Makanan Dan Minuman Aktivitas Lapangan	209.338.000,00
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	72.090.000,00
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	94.200.000,00
Beban Pakaian Batik Tradisional	12.920.000,00
Beban Pakaian Olahraga	567.645.000,00
Beban Pakaian Paskibraka	80.860.000,00
Beban Non Persediaan	224.323.000,00
Beban Bahan-Bahan Bakar Dan Pelumas	97.978.898,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	99.950.000,00
Jumlah	2.250.636.898,00

4.3.1.1.5 Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. 79.845.000,00 Rp. 84.950.000,00

Beban Pemeliharaan Merupakan Penurunan Manfaat Ekonomi Dalam Periode Pelaporan Yang Menurunkan Ekuitas, Yang Dapat Berupa Pengeluaran Atau Konsumsi Asset Atau Timbulnya Kewajiban Akibat Transaksi Pemeliharaan Barang. Beban Pemeliharaan Diakui Ketika Bukti Penerimaan Barang Atau Berita Acara Serah Terima Ditandatangani. Saldo Beban Pemeliharaan Badan Kesatuan



Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Hingga 31 Desember 2023
Sebesar Rp. 79.845.000,00 Dengan Perincian Sebagai
Berikut:

*Tabel 4. 27 Rekapitulasi Beban Pemeliharaan PER 31
Desember 2023*

JENIS BEBAN PEMELIHARAAN	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	19.940.000,00
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	29.905.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	15.000.000,00
Beban Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	15.000.000,00
Jumlah	79.845.000,00

4.2.2.1.6 Beban Perjalanan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Dinas Rp. **1.735.777.451,00** Rp 578.475.000,00

Beban Perjalanan Dinas Merupakan Penurunan Manfaat Ekonomi Dalam Periode Pelaporan Yang Menurunkan Ekuitas, Yang Dapat Berupa Pengeluaran Atau Konsumsi Aset Atau Timbulnya Kewajiban Akibat Transaksi Perjalanan Dinas. Beban Perjalanan Dinas Diakui Ketika Bukti Penerimaan Barang Atau Berita Acara Serah Terima Ditandatangani.

Saldo Beban Perjalanan Dinas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Hingga 31 Desember 2023 Sebesar Rp. **1.735.777.451,00** Dengan Perincian Sebagai Berikut:



4.3.1.1.8 Beban Penyusutan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. **553.239.575,00** Rp. 391.587.087,00

Beban Penyusutan Adalah Penyesuaian Nilai Sehubungan Dengan Penurunan Kapasitas Dan Manfaat Dari Suatu Aset. Metode Yang Dipakai Dalam Menghitung Penyusutan Adalah Metode Garis Lurus Tanpa Nilai Sisa. Formula Untuk Menghitung Beban Penyusutan Tiap Tahun Adalah Nilai Perolehan Dibagi Umur Ekonomis Suatu Aset Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi.

Saldo Beban Penyusutan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Hingga 31 Desember 2023 Sebesar Rp. **553.239.575,00** Dengan Perincian Sebagai Berikut:

Tabel 4. 30 Rekapitulasi Beban Penyusutan Per 31 Desember 2023

JENIS BEBAN PENYUSUTAN	JUMLAH BEBAN (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor	448.341.686,00
Beban Penyusutan Alat Kantor	15.331.665,00
Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga	19.645.058,00
Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	42.266.332,00
Beban Penyusutan Komputer Unit	24.692.834,00
Beban Penyusutan Peralatan Komputer	2.962.000,00
Total	553.239.575,00

4.2.3 Surplus/ Defisit - LO 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp. (78.413.739.893,00) Rp. (20.164.727.176,00)



Pada Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tercatat Bahwa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Mengalami Defisit-LO Sebesar Rp. (78.413.739.893,00) Yang Merupakan Hasil Dari Selisih Antara Pendapatan-LO Dengan Beban Selama Tahun 2023. Hal Ini Dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Bukan Salah Satu Instansi Pendapatan, Sehingga Nilai Defisit-LO Sebesar Beban Yang Terjadi Selama Tahun 2023.

4.4 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Merupakan Laporan Penghubung Antara Laporan Operasional Dengan Neraca Tentang Kenaikan Atau Penurunan Ekuitas Atas Aktivitas Operasional Pada Tahun Pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas Terlihat Bahwa Saldo Ekuitas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 2.996.249.597,00 Dengan Perhitungan Sebagai Berikut:

4.4.1 Ekuitas Awal	<u>01 Januari 2023</u>	<u>31 Desember 2023</u>
	Rp. 2.929.926.919,00	Rp. 3.309.663.671,00

Ekuitas Awal Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Merupakan Ekuitas Akhir Per 31 Desember 2023 Yaitu Sebesar Rp. 3.474.513.257,00.

4.4.2 Surplus/ Defisit - LO	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	(Rp.78.413.739.893,00)	(Rp. 20.262.672.434,00)

Jumlah Yang Tertera Pada Rekening Ini Sesuai Dengan Jumlah Yang Tercantum Pada Laporan Operasional, Yaitu Defisit Sebesar (Rp. 78.413.739.893,00). Pada Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi, Tercatat Bahwa



Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Mengalami Defisit-LO Sebesar (Rp. 78.413.739.893,00) Yang Merupakan Hasil Dari Selisih Antara Pendapatan-LO Dengan Beban Selama Satu Tahun. Hal Ini Dikarenakan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Bukan Salah Satu Instansi Pendapatan, Sehingga Nilai Defisit-LO Sebesar Beban Yang Terjadi Selama Tahun 2023.

Pada Laporan Perubahan Ekuitas, Jumlah Defisit-LO Tersebut Akan Mengurangi Ekuitas 31 Desember 2023.

4.4.3	Koreksi Ekuitas	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Lainnya	Rp. 930.576.727,00	Rp. 4.687.828.577,40

Pada Laporan Perubahan Ekuitas, Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya Per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 930.576.727,00 Yang Merupakan Hasil Penjumlahan Dari Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp. (930.576.727,00), Transfer Masuk Persediaan Rp. 705.000,00, Transfer Masuk Aset Tetap Rp. 981.597.560,00 Dengan Perincian Sebagai Berikut:

Tabel 4. 31 Rekapitulasi Koreksi Ekuitas Lainnya Per 31 Desember 2023

URAIAN	JUMLAH
	(Rp)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(51.725.833,00)
Transfer Masuk Persediaan	705.000,00
Transfer Masuk Aset Tetap	981.597.560,00
JUMLAH	930.576.727,00

4.4.4	Ekuitas Akhir	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
		Rp. (. 3.309.663.671,00)	(Rp. 2.929.926.919,00)



Ekuitas Akhir Merupakan Hasil Penjumlahan Dari Ekuitas Awal 01 Januari 2023 Rp. 2.929.926.919,00 Ditambah Dengan Surplus/Defisit-LO Rp. (19.329.189.491,00), Ditambah Dengan Koreksi Ekuitas Lainnya Sebesar Rp. 920.480.810,00 Dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Sebesar Rp. 18.953.295.019,00.



BAB V PENUTUP

Catatan Atas Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023, Dapat Disimpulkan Bahwa Secara Umum Sasaran-Sasaran Strategis Yang Ditetapkan Dalam Rencana Kinerja Tahunan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tahun 2023 Telah Dapat Dipenuhi. Diharapkan Catatan Atas Laporan Keuangan Ini Dapat Menginformasikan Data-Data Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Keuangan Dan Menjelaskan Laporan Keuangan Lembar Muka (Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Dan Laporan Perubahan Ekuitas). Berdasarkan Bab I Sampai Dengan Bab IV Dapat Disimpulkan Sebagai Berikut:

1. Target Realisasi Kinerja TA.2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023 Yang Tercermin Pada Indikator Keberhasilan Program Dan Kegiatan Tercapai 91,19%.
2. Ringkasan Neraca TA.2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. Jumlah Aset Tetap Per 31 Desember 2023 Sebesar Rp. 3.232.819.834,00 Dan Aset Per 31 Desember 2022 Sebesar Rp. 2.850.487.682,00 Mengalami Kenaikan Rp. 382.332.152,00 Atau 13,41%. Hal Ini Dikarenakan Adanya Penambahan Dari Belanja Modal, Mutasi Masuk Dan Pengurangan Mutasi Keluar Dan Reklas Barjas Sedangkan Pengurangan Adanya SK Penghapusan Aset Lainnya.
3. Laporan Operasional TA.2023 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tahun Anggaran 2023. Pada Laporan Operasional Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Tercatat Bahwa Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Mengalami Defisit-LO Sebesar **(Rp. 78.413.739.893,00)** Yang Merupakan Hasil Dari Selisih Antara Pendapatan-LO Sebesar Rp0,00 Dengan Beban Sebesar **(Rp. 78.413.739.893,00)** Selama Tahun 2023.



4. Dari Laporan Perubahan Ekuitas TA.2023, Saldo Ekuitas Awal Tahun 2023 Sebesar Rp. 2.929.926.919,00 Surplus/(Defisit) - LO Sebesar (Rp. 78.413.739.893,00), Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Sebesar Rp. 930.576.727,00 Dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan Sebesar Rp. 77.862.899.918,00. Dan Total Ekuitas Akhir Yang Merupakan Kekayaan Bersih Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bekasi Per-31 Desember 2023 Sebesar **Rp. 3.309.663.671,00.**

Bekasi, 21 Mei 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA BEKASI**



NESAN SUJANA, S.T, M.T, CGCAE
NIP. 19740708 200212 1 007